

**EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
SESUAI PERMENDAGRI NO. 81 TAHUN 2015 TENTANG
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
(STUDI PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DI
KECAMATAN UKUI)**

Oleh :

**AMRI JUHARZA
NPM : 167321034**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, Istri tercinta Meily Roffiza serta anak-anak tercinta M. Rafif Ahlam, M. Rifqy Ramadhan, Noor Zahwa, M. Razeen Hirfandy, Noor Zahwa Hastifandy dan Daffa Rizki Adha yang selalu mendoakan. Serta teman-teman kerja yang selalu mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap Hamba Allah yang telah ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini. Kupersembahkan Tesis ini kepada : Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda H. Abdul Hamid Idris dan Ibunda Hj. Usty Erni yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukung, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

TUNJUK AJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

وَالْعَصْرِ (١)

1. Demi masa.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ (٢)

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ □ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ □ (٣)

3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

ABSTRAK

AMRI JUHARZA

Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dimaksudkan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil dari perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui fektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Ukui adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Kecamatan Ukui memiliki 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) Kelurahan. Dalam penlitian ini dibatasi untuk mengabil tiga lokasi, yaitu Kelurahan Ukui Satu, Desa Ukui Dua dan Desa Lubuk Kembang Bunga. Fenomena yang terjadi terkait dengan penelitian ini yaitu terdapat beberapa desa yang memiliki potensi dan sumber daya alam yang besar dengan APBDes yang cukup besar, akan tetapi desa tersebut dinilai kurang berkembang sehingga menjadi misteri yang akan dikaji melalui indikator evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Terdapat beberapa desa yang tidak memiliki potensi dan sumber daya alam yang besar, akan tetapi desa tersebut dinilai sebagai desa yang telah berkembang. Terdapat desa yang terlihat berkembang/cepat berkembang, yang memiliki infrastruktur yang cukup lengkap seperti jalan yang sudah beraspal, fasilitas kesehatan yang cukup lengkap seperti terdapat praktek dokter/bidan, terdapat poliklinik dan polindes. Kemudian fasilitas pendidikan yang lengkap seperti adanya taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) lebih dari satu dan sekolah menengah (SMP) yang telah tersedia, namun desa tersebut dinilai kurang berkembang. Dalam menentukan status pekembangan desa, penelitian ini menggunakan indikator yang telah diatur didalam Pemendagri Nomor 81 Tahun 2015 Pasal 8 meliputi evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan. Peneitian ini menggunakan penelitian kualitatif, informan dalam penetian ini meliputi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekretaris Desa, Lurah Ukui Satu dan Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan Kelurahan Ukui Satu dinilai sebagai kelurahan dengan kategori berkembang, hal ini dikarena kelurahan ukui satu berada tidak jauh dari pusat ibukota Kecamatan, dimana disana terdapat pertokohan dan pasar yang menghidupkan aktifitas ekonomi, karena ciri-ciri daerah yang berkembang adalah terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi yang menjadi penghasilan masyarakatnya selain dari sektor perkebunan. Pada aspek pendidikan Kelurahan Ukui Satu telah memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai, begitu juga dengan fasilitas kesehatan. Desa Ukui Dua dinilai sebagai desa yang berpotensi untuk berkembang, hal ini dikarenakan desa ukui dua berada tidak berada jauh dari ibukota kecamatan ukui, jadi dari sisi aktifitas ekonomi dapat dimanfaatkan warganya untuk berdagang. Selain itu desa ukui dua memiliki potensi yang sangat tinggi diwilayahnya, dimana terdapat wilayah yang telah dijadikan sumur minyak oleh PT Pertamina Lirik, dari sana mereka mendapatkan bagi hasil, sehingga

setiap tahunnya desa ukui dua memiliki APBDes 2 milyar lebih. Tentu ini adalah modal untuk dapat dikembangkan dengan melakukan inovasi dan terobosan dalam kemajuan wilayahnya. Pada aspek pendidikan desa ukui dua telah memiliki fasilitas yang memadai, begitu pula pada aspek kesehatan. Desa Lubuk Kembang Bunga dinilai sebagai desa yang kurang berkembang, hal ini dikarenakan desa lubuk kembang bunga berada sangat jauh dari ibukota kecamatan ukui. Selain desa ini memiliki wilayah terluas di kecamatan ukui, namun memiliki jumlah persebaran penduduk yang sedikit, karena wilayah teluasnya merupakan kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN), namun luasnya wilayah menjadi potensi desa lubuk kembang bunga mendapatkan porsi dana desa yang lebih besar ketimbang desa lainnya. Pada aspek pendidikan dan kesehatan desa lubuk kembang bunga belum memiliki fasilitas yang memadai, terutama jarak fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sangat jauh dari 2 dusun yang berada jauh dari ibukota desa, padahal 2 dusun ini memiliki jumlah penduduk 40% dari total populasi penduduk desa kembang bunga, namun tidak memiliki fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lalu pada aspek tanggap dan siaga bencana. Desa lubuk kembang bunga adalah desa yang rentan terhadap bencana banjir, hingga saat ini belum ada upaya serius yang dilakukan untuk mitigasi bencana banjir ini.

Kata Kunci : Evaluasi, Perkembangan, Desa

ABSTRACT

AMRI JUHARZA

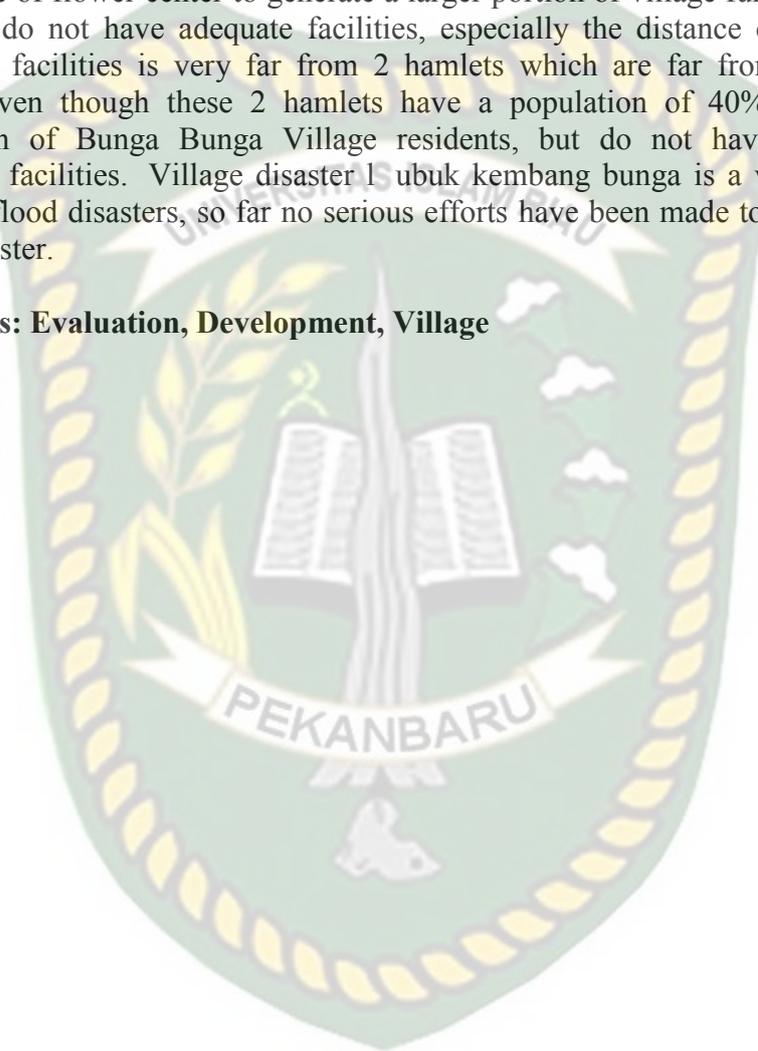
The Regulation of the Minister of Home Affairs Number 81 of 2015 concerning Evaluation of Village and Sub-District Development is intended to determine the specific status of the results of the development of a village and sub-district and to determine the effectiveness of governance, development, community development and community empowerment. Ukui District is one of the sub-districts in Pelalawan Regency, Riau Province, Ukui District has 11 (eleven) villages and 1 (one) Kelurahan. This research was limited to taking three locations, namely Ukui Satu Village, Ukui Dua Village and Lubuk Kembang Bunga Village. The phenomenon that occurs related to this research is that there are several villages that have great potential and natural resources with large enough APBDes, but these villages are considered to be underdeveloped so that it is a mystery that will be studied through evaluation indicators of rural and urban village development. There are several villages that do not have great potential and natural resources, but these villages are considered as developed villages. There are villages that seem to be developing / fast developing, which have fairly complete infrastructure such as roads that have been paved. fairly complete health facilities such as a doctor's practice midwife, polyclinic and polindes. Then complete educational facilities such as kindergarten (TK), more than one elementary school (SD) and middle school (SMP) are available, but the village is considered less developed. In determining the use of indicators that have been regulated in Pemendagri Number 81 of 2015 Article 8 includes evaluation of the government sector, evaluation of the territorial field and evaluation of the social sector. This research uses qualitative research, informants in this determination include the Head of the Village Community Empowerment Service, the Village Secretary, the Head of Ukui Satu Village and the Village Head. The results showed that Ukui Satu Village was assessed as being friendly with a developing category, this is because the Ukui Satu Village is not far from the center of the district capital where there are figures and markets that animate economic activity because the characteristics of a developing region are various kinds of economic activities that become income. The community apart from the plantation sector In the educational aspect, Ukui Satutelah Village has adequate educational facilities, as well as the health facilities in Ukui Dua Village is considered as a village that has the potential to develop, this is because Ukui Dua Village is not far from the capital of Uuku District, so from the side of activities the economy can be used by its citizens to trade. In addition, Ukui Dua village has very high potential in its area, where there are areas that have been used for oil and gas by PT Pertamina Lirik, and there they get profit sharing so that each year the Ukui Dua village has more than 2 billion APBDes. Of course this is the capital to be developed by making innovations and breakthroughs in the progress of the region. In the education aspect, Ukui Dua village has adequate facilities, as well as in the health

aspect, Lubuk Kembang Bunga Village is considered an underdeveloped village, this is because the village of Lubuk Bunga Bunga is very far from the capital of the Ukui sub-district besides this village has the largest area in the Ukui sub-district. However, it has a small number of population distribution, because its vast area is the Teso Nilo National Park (TNTN), but its area has the potential for the village of flower center to generate a larger portion of village funds than other villages. do not have adequate facilities, especially the distance of health and education facilities is very far from 2 hamlets which are far from the village capital, even though these 2 hamlets have a population of 40% and a total population of Bunga Bunga Village residents, but do not have health and education facilities. Village disaster Lubuk kembang bunga is a village that is prone to flood disasters, so far no serious efforts have been made to mitigate this flood disaster.

Keywords: Evaluation, Development, Village

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat melaksanakan segala aktivitas dalam merampungkan tesis dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Study Pemerintahan Desa Di Kecamatan Ukui)” yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan tesis ini banyak dihadapi penulis, namun berkat bimbingan dan petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak, baik moral maupun materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Olehnya itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Universitas Islam Riau, atas bantuan dan respon positif yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memimpin Program Pasca Sarjana ini sehingga nantinya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tempat ini.
3. Yth. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.

4. Yth. Bapak Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan pada penulis sehingga selesainya tesis ini.
5. Yth. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan pada penulis sehingga selesainya tesis ini.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau atas jasa-jasanya dalam membimbing penulis.
7. Yang sangat saya dicintai dan sayangi isteri dan anak-anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan.
8. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat motivasi serta bantuan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Akhirnya tiada harapan selain ridha Allah SWT atas segala jerih payah dan jasa baik kita semua serta limpahan rahmat, dan hidayah-Nya senantiasa tetap tercurah kepada kita sekalian, Aamiin..

Wassalam
Pekanbaru, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL TESIS | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Batasan Masalah | 12 |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| | |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN | |
| A. Kajian Pustaka | 14 |
| 1. Ilmu Pemerintahan | 14 |
| 2. Konsep dan Teori Pemerintah dan Pemerintahan | 26 |
| 3. Organisasi Pemerintahan | 32 |
| 4. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan | 36 |
| 5. Pemerintahan Desa | 40 |
| 6. Kebijakan Publik | 43 |
| 7. Implementasi Kebijakan Publik | 46 |
| B. Kerangka Pemikiran..... | 55 |
| C. Konsep Operasional | 56 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Tipe Penelitian | 59 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 61 |
| C. Penentuan Informan | 61 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 61 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 62 |
| F. Teknik Analisis Data | 64 |
| G. Jadwal Penelitian | 66 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Identitas Informan | 69 |
| B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 70 |
| C. Hasil Penelitian | 84 |
| C.1. Kelurahan Ukui Satu | 85 |
| C.2. Desa Ukui Dua | 97 |
| C.3. Desa Lubuk Kembang Bunga | 114 |
| C.4. Bagaimanakah Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan | 132 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 140 |
| B. Saran..... | 142 |



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel :

| | | |
|--------|--|----|
| I.1. | Jumlah Desa, Luas, dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2020) | 7 |
| I.2. | Klasifikasi Desa Berdasarkan Index Desa Membangun (IDM) | 8 |
| I.3. | Klasifikasi Status Desa Di Kecamatan Ukui Tahun 2020 | 8 |
| III.1. | Informan Penelitian Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Studi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ukui) | 61 |
| III.2. | Jadwal Penelitian..... | 67 |
| IV.1. | Daftar informan..... | 69 |
| IV.2. | Presentase Luas Wilayah Dan Persentase Luas Wilayah Desa/ Kelurahan Di Kecamatan Ukui Tahun 2019 | 71 |
| IV.3. | Jarak Tempuh Dari Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui ke Kantor Bupati dan ke Kantor Camat (Km) Tahun 2019 | 72 |
| IV.4. | Status Pemerintahan dan Jumlah RT/RW Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui Tahun 2019 | 73 |
| IV.5. | Daftar Identitas Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Ukui Akhir Tahun 2019 | 74 |
| IV.6. | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui Tahun 2019 | 75 |
| IV.7. | Jumlah Sekolah Umum Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ukui Tahun 2019 | 76 |
| IV.8. | Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui Tahun 2019 | 77 |
| IV.9. | Jumlah Sarana Perekonomian di Kecamatan Ukui..... | 77 |
| IV.10. | Jumlah Sarana Komunikasi dan Informasi di Kecamatan Ukui Tahun 2019 | 78 |

| | |
|---|-----|
| IV.11. Jumlah Koperasi Aktif Menurut Jenis Koprasi di Kecamatan Ukui Tahun 2019 | 79 |
| IV.12. Jumlah Bank Menurut Jenis Bank di Kecamatan Ukui Tahun 2019 | 80 |
| IV.13. Rekapitulasi Evaluasi Perkembangan Desa di Kecamatan Ukui. | 131 |



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar :

| | |
|-----------------------------|----|
| II.1. Kerangka Pikiran..... | 55 |
|-----------------------------|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah Negara yang dibangun dari sebuah desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Inilah cikal bakal sebuah Negara yang bernama Indonesia. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Pengakuan negara akan adanya desa secara tegas telah diatur pertama kalinya didalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja,

kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan yang ketiga Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa lebih banyak mengakomodir kepentingan desa untuk lebih mengatur, mengelola dan menjawab permasalahan di tengah masyarakat desa, dan dalam pelaksanaannya yang lebih terperinci telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pada tanggal 30 Desember 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menetapkan Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, tahun tersebut. Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi

perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ditetapkan untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan dan untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendagri Nomor 81 tahun 2015 mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan. Pertimbangan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah:

1. bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
2. bahwa untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Kecamatan Ukui adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Kecamatan Ukui memiliki 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) Kelurahan. Keberadaan desa di Kecamatan Ukui memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah yang beragam, untuk itu dibawah ini akan disajikan informasi tersebut.

Tabel I.1 : Jumlah Desa, Luas, dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

| No | Desa/Kelurahan | Luas | Jumlah Penduduk | | Jumlah |
|-------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | Laki-Laki | Perempuan | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Silikuan Hulu | 15,28 | 1.205 | 1.204 | 2.409 |
| 2 | Lubuk Kembang Sari | 19,8 | 1.647 | 1.619 | 3.266 |
| 3 | Lubuk Kembang Bunga | 15,28 | 2.116 | 1.697 | 3.913 |
| 4 | Air Hitam | 214,57 | 2.198 | 1.936 | 4.134 |
| 5 | Kampung Baru | 11,56 | 1.558 | 1.472 | 3.030 |
| 6 | Ukui Satu | 18,95 | 3.148 | 2.976 | 6.122 |
| 7 | Ukui Dua | 257,04 | 3.744 | 3.281 | 7.025 |
| 8 | Bukit Gajah | 19,87 | 1.851 | 1.784 | 3.635 |
| 9 | Bukit Jaya | 11,19 | 1.035 | 985 | 2.020 |
| 10 | Air Emas | 13,25 | 1.257 | 1.186 | 2.443 |
| 11 | Tri Mulya Jaya | 5,82 | 874 | 746 | 1.620 |
| 12 | Bagan Limau | 12,47 | 860 | 727 | 1.587 |
| Ukui | | 615,08 | 21.591 | 19.613 | 41.204 |

Sumber : Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa luas wilayah terluas terdapat di Desa Ukui 2 (dua) yakni 257,04 Km², kemudian Desa Air Hitam dengan luas 214,57 Km², dan Desa Bukit Gajah 19,87 Km². Jumlah penduduk

terbanyak terdapat di Desa Ukui Dua yaitu 7.025 jiwa, Desa Ukui Satu 6.122, dan Desa Air Hitam 4.134 jiwa.

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari Potensi Desa, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Untuk perhitungan IDM 2015 digunakan sumber data PODES tahun 2014. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

Prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut :

1. Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5: semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik \leq 3 Km. maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik $>$ 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.
2. Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan $<$ 30 menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktifitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks :

\sum Indikator X

Indeks Variabel : _____

Nilai Maksimum (X)

3. Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

: Indeks Sosial : Indeks Ekonomi : Indeks Lingkungan (Ekologi) IDM IS
IEK

$$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$$

IDM : Indeks Desa Membangun

IS : Indeks Sosial

IEK : Indeks Ekonomi

IL : Indeks Lingkungan

Tiga pilar tersebut di atas saling terkait. Komitmen untuk diharapkan dapat melipatgandakan mendayagunakan sebagai pendekatan kemampuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan KL lainnya mencapai target dan menghasilkan dampak yang bisa dipertahankan (*sustained impact*) untuk kemajuan dan kesejahteraan kehidupan Desa.

Dalam kaitan penajaman fokus dan lokus dalam pengembangan program prioritas (program unggulan dan kegiatan prioritas), pilar-pilar tersebut di atas dapat menjadi pijakan untuk membangun instrumen program di mana Indeks Desa Membangun berguna untuk penetapan lokus. Berdasar Indeks Desa Membangun dapat ditetapkan 15.000 Desa yang menjadi lokus dari pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang terdiri dari 5.000 Desa

Sangat Tertinggal, 5.000 Desa Tertinggal, 2.500 Desa Berkembang, dan 2.500 Desa Maju, yang di dalam jumlah 15.000 Desa dengan semua status Desa itu terdapat 1.138 Desa Perbatasan.

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal.

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

Tabel I.3 : Klasifikasi Desa Berdasarkan Index Desa Membangun (IDM)

| No | Status Desa | Nilai Batas |
|----|-------------------|----------------------------|
| 1 | Sangat Tertinggal | $\leq 0,491$ |
| 2 | Tertinggal | $> 0,491$ dan $\leq 0,599$ |
| 3 | Berkembang | $> 0,500$ dan $\leq 0,707$ |
| 4 | Maju | $> 0,707$ dan $\leq 0,815$ |
| 5 | Mandiri | $> 0,851$ |

Sumber : Kecamatan Ukui

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan.

Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam. ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potens ial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.



Gambar I.1. Tiga Dimensi Indeks Desa Membangun

Tabel I. 3 : Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Ukui Tahun 2020

| No | Nama Desa | IKS 2020 | IKE 2020 | IKL 2020 | Nilai IDM 2020 | Status IDM |
|----|---------------------|----------|----------|----------|----------------|------------|
| 1 | Air Hitam | 0,7543 | 0,5833 | 0,8000 | 0,7125 | Maju |
| 2 | Air Emas | 0,7943 | 0,8000 | 0,9333 | 0,8425 | Mandiri |
| 3 | Bukit Gajah | 0,8000 | 0,8333 | 0,8667 | 0,8333 | Mandiri |
| 4 | Bukit Jaya | 0,8286 | 0,7833 | 1,0000 | 0,8706 | Mandiri |
| 5 | Kampung Baru | 0,7886 | 0,75 | 0,9333 | 0,824 | Mandiri |
| 6 | Lubuk Kembang Bunga | 0,7771 | 0,6500 | 0,8667 | 0,7646 | Maju |
| 7 | Lubuk Kembang Sari | 0,9429 | 0,8000 | 1,0000 | 0,9143 | Mandiri |
| 8 | Silikuan Hulu | 0,8857 | 0,8333 | 0,8667 | 0,8619 | Mandiri |
| 9 | Tri Mulya Jaya | 0,8229 | 0,8333 | 1,0000 | 0,8854 | Mandiri |
| 10 | Ukui Dua | 0,8686 | 0,6000 | 0,6667 | 0,7784 | Maju |
| 11 | Bagan Limau | 0,8457 | 0,6833 | 0,6667 | 0,7319 | Maju |

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui Kecamatan Ukui memiliki tujuh Desa yang status IDM nya Mandiri, dan empat Desa yang memiliki status IDM Maju.

Selanjutnya Informasi mengenai klasifikasi status desa yang berada diwilayah Kecamatan Ukui dapat dilihat dibawah ini.

Tabel I.3 : Klasifikasi Status Desa Di Kecamatan Ukui Tahun 2020

| No | Desa/Kelurahan | Indeks | Klasifikasi | Kategori |
|----|--------------------------|--------|-------------|----------|
| 1 | Kelurahan Ukui | - | Swadaya | Mula |
| 2 | Desa Silikuan Hulu | 0.75 | Swakarya | Mula |
| 3 | Desa Lubuk Kembang sari | 0.80 | Swasembada | Mula |
| 4 | Desa Lubuk Kembang Bunga | 0.88 | Swasembada | Mula |
| 5 | Desa Air Hitam | 0.53 | Swadaya | Lanjut |
| 6 | Desa Kampung Baru | 0.84 | Swasembada | Lanjut |
| 7 | Desa Ukui Dua | 0.71 | Swakarya | Mula |
| 8 | Desa Bukit Gajah | 0.81 | Swasembada | Mula |
| 9 | Desa Bukit Jaya | 0.77 | Swakarya | Madya |
| 10 | Desa Air Emas | 0.76 | Swakarya | Mula |
| 11 | Desa Trimulya Jaya | 0.77 | Swakarya | Lanjut |
| 12 | Desa Bagan Limau | 0.72 | Swakarya | Mula |

Sumber : Kecamatan Ukui

Dalam perkembangannya desa dituntut untuk dapat memberikan informasi terhadap potensi dan keadaan suatu desa tersebut. Salah satu indikatornya adalah pembuatan profil desa. Bagaimanakah ketersediaan, kelengkapan dan akuntabilitas bisa disajikan profil desa, apakah profil desa tersebut dapat memberikan perubahan terhadap status desa tersebut, apakah tersedia sumber daya manusia dan peralatan yang cukup di desa tersebut dalam melaksanakan pembuatan profil desa, apakah penyajian profil desa tersebut bermanfaat bagi khalayak umum dan juga faktor – faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembuatan profil desa tersebut.

Disamping itu perlu juga diketahui sejauhmana perkembangan desa tersebut dalam melakukan efektivitas, tingkat perkembangan desa, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa melalui pembangunan yang dilakukan desa.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi:

- a. pemantauan; dan
- b. penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. evaluasi bidang pemerintahan;
- b. evaluasi bidang kewilayahan; dan
- c. evaluasi bidang kemasyarakatan.

Penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan dilakukan dengan tahapan:

- a. evaluasi diri di tingkat desa dan kelurahan;
- b. penilaian di tingkat kecamatan;

- c. analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi, dan pemeringkatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan
- d. Keputusan Menteri mengenai tingkat perkembangan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan meliputi aspek :

- a. Pemerintahan;
- b. kinerja;
- c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
- d. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/EGovernment; dan
- e. pelestarian adat dan budaya.

Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan sebagaimana meliputi aspek:

- a. identitas;
- b. batas;
- c. inovasi;
- d. tanggap dan siaga bencana; dan
- e. pengaturan investasi.

Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi aspek partisipasi masyarakat; lembaga kemasyarakatan; pemberdayaan kesejahteraan keluarga; keamanan dan ketertiban; pendidikan; kesehatan; ekonomi; penanggulangan kemiskinan; dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, ditetapkan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan terdiri atas Instrumen pemantuan; dan Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan; Instrumen pemantauan serta Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan merupakan satu kesatuan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Melalui observasi yang peneliti lakukan secara bertahap, sejumlah fenomena ditemukan dalam evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di Kecamatan Ukui, fenomena itu dapat di deskripsikan dibawah ini :

1. Terdapat beberapa desa yang memiliki potensi dan sumber daya alam yang besar dengan APBDes yang cukup besar, akan tetapi desa tersebut dinilai kurang berkembang sehingga menjadi misteri yang akan dikaji melalui indikator evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
2. Terdapat beberapa desa yang tidak memiliki potensi dan sumber daya alam yang besar, akan tetapi desa tersebut dinilai sebagai desa yang telah berkembang.
3. Terdapat desa yang terlihat berkembang/cepat berkembang, yang memiliki infrastruktur yang cukup lengkap seperti jalan yang sudah beraspal, fasilitas kesehatan yang cukup lengkap seperti terdapat praktek dokter/bidan, terdapat poliklinik dan polindes. Kemudian fasilitas pendidikan yang lengkap seperti adanya taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) lebih dari satu dan sekolah menengah (SMP) yang telah tersedia, namun desa tersebut dinilai kurang berkembang.

Fenomena tersebut menjadi gambaran bahwa perlunya dilakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk melihat secara utuh keadaan serta kondisi di lapangan dengan mengacu Permendagri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Sehingga penelitian ini akan diberi judul “Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Sesuai Permendagri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi

Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Studi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Ukui).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah penelitian yaitu “Bagaimanakah Pelaksanaan Permendagri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Studi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Ukui) ? ”.

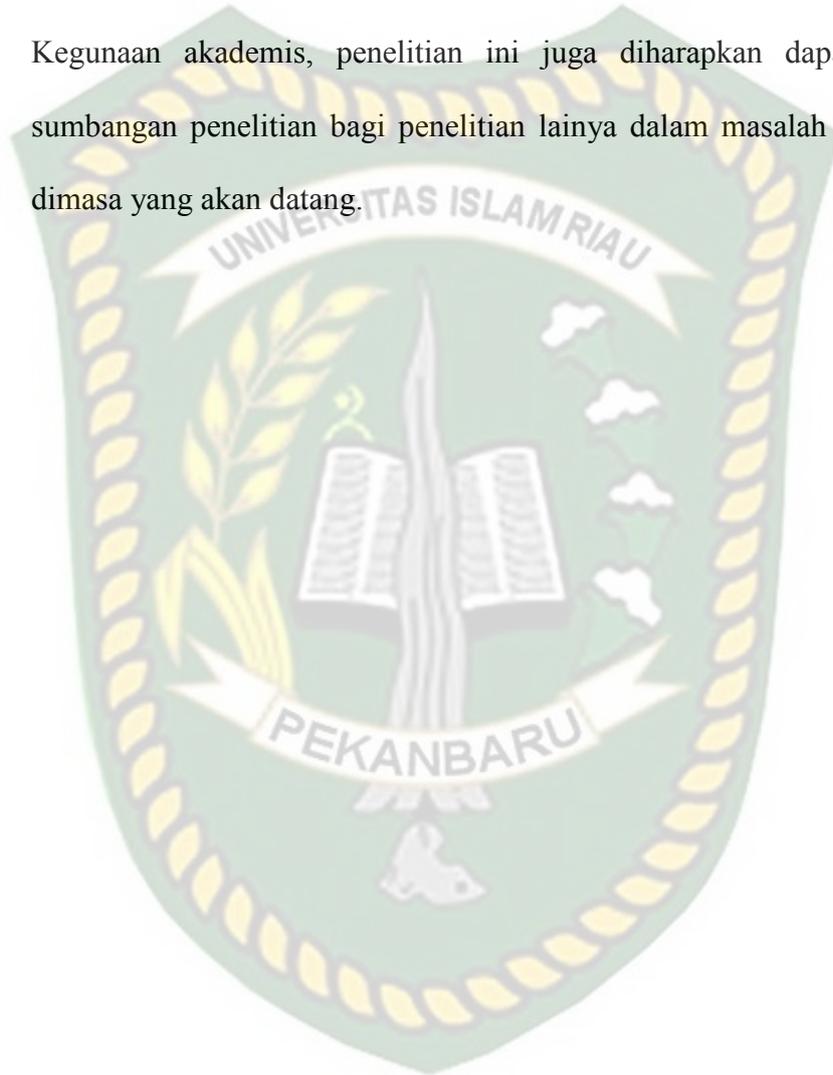
C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dibatasi hanya memfokuskan kepada 3 (tiga) hal, yaitu evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan Kelurahan Ukui Satu, Desa Ukui Dua dan Desa Lubuk Kembang Bunga.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Studi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Ukui
2. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahan terutama yang berkaitan dengan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Studi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ukui).

- b. Kegunaan praktis, sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah desa dan kelurahan dalam meningkatkan evaluasi perkembangan desa di Kecamatan Ukui.
- c. Kegunaan akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan penelitian bagi penelitian lainya dalam masalah yang sama dimasa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan merupakan ilmu mandiri yang memiliki metodologi ilmu tersendiri. Objek yang disoroti (objek material) dari ilmu pemerintahan adalah Negara sebagai organisasi yang terbesar di dunia, sedangkan fokus objek kajian ilmu pemerintahan (objek formal) berkaitan dengan kewenangan dan pelayanan. Berbicara ilmu pemerintahan erat hubungannya dengan kybernologi karena kybernologi merupakan konstruksi dari ilmu pemerintahan. Kybernologi hadir sebagai konsep untuk merekonstruksi kembali ilmu pemerintahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Van Poelje bahwa ilmu pemerintahan merupakan yang bertujuan menuntun hidup bersama manusia dalam upaya mengejar kebahagiaan rohani dan jasmani sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara sah.¹

Van Poelje menambahkan *de bestuurskunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt* (ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin sebaik-baiknya).² Teori tersebut memberikan pemahaman bahwa ilmu pemerintahan adalah bagaimana intansi atau organisasi pemerintahan disusun dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kerangka kewenangan dan pelayanan baik pelayan sipil maupun pelayanan publik. Lebih memfokuskan kepada pelayanan Ndraha menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang

¹Ndraha, Taliziduhu, 2008. *Kybernologi Kepamongprajaan*. Sirao Credentia Center, Tangerang Banten. Hal 61-62

²Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Mandar Maju, Bandung. Hal 21

bersangkutan.³ Pendapat tersebut menekankan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat melalui jasa publik dan pelayanan yang diberikan kepada penerima pelayanan (masyarakat), yang dimaksud pemberi pelayanan adalah pemerintah selaku organ atau instansi terbesar di dalam suatu negara.

Rosenthal mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari stuktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum dapat diartikan sebagai keseluruhan struktur dan proses dimana keputusan-keputusan yang mengikat diambil.⁴ Menurut penulis maksud dari pemerintahan umum merupakan seluruh struktur pemerintahan mulai dari paling atas yaitu pemerintahan pusat sampai pada sistem pemerintahan yang paling rendah (pemerintahan desa) dan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yaitu peraturan perundang-undangan baik secara internal maupun secara eksternal dari instansi pemerintahan tersebut.

Penjelasan lebih rinci mengenai ilmu pemerintahan dijelaskan oleh Ndraha yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut. Pertama dari sudut bagaimana seharusnya (normative, ideal, dan das Sollen). Sedangkan kedua dari sudut bagaimana senyatanya jadi empiris dan das Sein).⁵ Ada dua hal yang harus difahami dari pengertian ilmu pemerintahan di atas, pertama ilmu pemerintahan itu mengkaji dari sudut apa proses pemerintahan

³ Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 7

⁴ Syafiie,. Op. Cit.,Hal 34

⁵ Ndraha,. Op. Cit

yang seharusnya dilaksanakan, tentu idealnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua ilmu pemerintahan mengkaji bagaimana senyatanya terjadi dilapangan, apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

Sebuah ilmu dapat dikatakan menjadi sebuah ilmu terlebih dahulu harus memiliki aksiologi yang memberikan manfaat dan tujuan apabila diaplikasi ditengah-tengah masyarakat, Syafiie mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum agar dapat memahami teori-teori bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan dan mampu menempatkan diri serta ikut berperan di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan di dalam negeri.⁶ Jelas manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah meningkatkan kompetensi baik seseorang maupun sekelompok orang untuk berperan, berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah domisili masing-masing yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat kearah progresif.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Menurut C.F Strong Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif,

⁶ Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 26

Legislatif, dan Yudikatif.⁷ Menurut Samuel Edwar Finer pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*proses*), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.⁸

Menurut Ndraha Ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil.⁹ Menurut Syafiie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.¹⁰ Menurut Poelje mendefenisikan ilmu pemerintahn sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.¹¹

Menurut ilmu pemerintahan mengkontruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.¹² Menurut Budiarjo mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemandirian, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan

⁷ C. F Strong dalam Drs. Inu Kencana Syafiie, 2011. *Ilmu Pemerintahan*, M.Si, halm. 31)

⁸ Opcit. Hal. 16, Samuel Edwar, hal 32

⁹ Opcit. Hal. 16, Ndraha, 2011. Hal. 7

¹⁰ Opcit. 8

¹¹ Opcit

¹² Opcit. Labobo. Hal. 2

wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.¹³

Menurut Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.¹⁴ Menurut Syafiie pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang telah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.¹⁵ Menurut Surbakti istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara.

Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.¹⁶

Sedangkan menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

¹³ Opcit. Gaffar

¹⁴ Rasyid. dalam Labolo 2011. Hal. 19

¹⁵ Loc. Cit.hal 16 Syafiie, 2011. Hal. 20

¹⁶ Loc. Cit. Hal. 168

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan dan layanan sivil termasuk layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.¹⁷

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada Kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai sesuatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan Negara.¹⁸ Pemerintah dan pemerintahan dua kata yang berasal dari kata dasar yang sama yaitu “perintah”, kata yang pertama tidak memiliki akhiran sedangkan kata yang kedua memiliki akhiran

¹⁷ Op. Cit Ndraha, 79

¹⁸ Yusri Munaf, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau. Hal. 47

“an”. Sekilas secara etimologi kata pemerintah dan pemerintahan tidak begitu memiliki perbedaan yang signifikan, namun secara terminologi kata pemerintah dan pemerintahan memiliki makna dan istilah yang sangat berbeda. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan¹⁹.

Hampir sama dengan pendapat sebelumnya Suryaningrat menjelaskan Pemerintah dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah” yaitu:

- a. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang dipertintahkan.
- b. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah.
- d. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah.²⁰

Dari dua teori pemerintah di atas, adanya dua pihak yang saling ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pihak yang pertama yang memberi perintah dan pihak yang kedua adalah yang menerima perintah, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memberikan perintah dan pihak yang diperintah harus menunjukkan kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan apa yang diperintah sepanjang sesuai dengan aturan yang ditentukan melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian

¹⁹ Ibid, Hal 20

²⁰Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 9

jalanan hubungan emosional merupakan tonggak awal antara memberi dan menerima perintah

Bicara pemerintah secara umum berarti organ, lembaga, badan atau instansi mulai dari kedudukan tertinggi (pemerintah), sampai kedudukan yang terendah (pemerintah desa) dan unsur-unsur yang berada di dalamnya yang berwenang memberikan dan memproses pelayanan sipil dan pelayanan publik, karena pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat konsekuensi dari terciptanya sebuah negara yang disepakati dan diberikan amanat oleh rakyat untuk mengurus dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara²¹.

”Ndraha mengatakan bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap org yang melakukan hubungan pemerintahan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayangkannya.”²²

Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas yang menjelaskan bahwa pemerintah merupakan salah satu sub komponen geografis satu Negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah tertentu²³. Beberapa teori pemerintah yang dijelaskan sebelumnya, ada dua hal penjelasan yang penulis simpulkan. Pertama, pemerintah hadir karena konsekuensi dari kemerdekaan sebuah negara yang berdaulat namun kegiatan dan

²¹Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 21

²²Ndraha,.Op. Cit Hal 6

²³Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal 25

proses dalam aplikasinya tersusun dan terorganisir serta memiliki payung hukum tertinggi (konstitusi). Kedua, pemerintah sebagai organ, lembaga atau badan yang memiliki kewenangan memberikan pelayanan kepada setiap warga negaranya sesuai dengan konstitusi yang disetujui bersama. Pelayanan yang dimaksud disini menyentuh semua aspek termasuk pelayanan dalam memberikan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarana. Seperti yang dikemukakan oleh Awang dan Wijaya bahwa pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjadi dan menjamin sistem ketertiban dan penyedia sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktifitas sosialnya²⁴.

Dari sisi kebijakan publik pemerintah merupakan satu-satunya organ, badan atau instansi yang diberikan kewenangan untuk merumus dan menetapkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau acuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awang dan Wijaya mengatakan pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara²⁵. Pendapat di atas menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah memiliki kewenangan merumus dan menetapkan serta mengimplementasikan kebijakan publik sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan secara berdaulat yang berpedomankan oleh hukum, adat

²⁴Awang, Azam, Wijaya, 2012. Ekologi Pemerintahan. Alaf Riau, Pekanbaru. Hal 7

²⁵Ibid, Hal 6

istiadat dan institusi atau lembaga-lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Beberapa teori mendefenisikan pemerintah dalam secara luas dan secara sempit, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan oleh Kansil dan Christine memberikan penjelasan bahwa pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR.²⁶ Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga eksekutif yang lembaganya bertugas mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, sedangkan terminologi pemerintah secara luas adalah seluruh organ atau badan baik *main state organ* maupun *auxeliry state organ*, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah hadir sebagai organ atau badan dengan sejumlah tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prajudi mengatakan tugas pemerintah adalah antara lain tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintahan adalah pengaturan pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan²⁷. Tugas dan fungsi pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan tugas yang komplit dan menyeluruh, menyentuh berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat termasuk tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan.

²⁶ Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta. Hal 150

²⁷ Syafiie,., Op. Cit., Hal 33

“Ndraha mengatakan, fungsi pemerintah, yang pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah semakin meningkat kondisi primer yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai *provider* jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi yang disingkat sebagai fungsi pelayanan (*servicing*). Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.”²⁸

Ada dua fungsi pemerintah yang dijelaskan oleh teori di atas, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer erat kaitannya fungsi pelayanan yang tidak dapat diprivatisasikan atau diserahkan kepada organisasi swasta, fungsi primer hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui pelayanan sipil dan pelayanan birokrasi serta meningkatkan kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Kemudian, fungsi sekunder merupakan fungsi sebaliknya, yaitu fungsi yang bersifat negatif maksudnya dengan dilaksanakannya fungsi ekonomi, politik dan sosial maka berdampak semakin kuatnya bargaining position yang mengakibatkan pembaharuan masyarakat yang diperintah.

Pemerintah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas merupakan organ yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat. Rasyid mengatakan fungsi pemerintah secara hakiki yaitu memberikan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*)²⁹. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga hal, pertama pemberian pelayanan baik itu pelayanan sipil yaitu pelayanan yang dimonopoli oleh

²⁸ Ndraha, Op. Cit Hal 76

²⁹ Rasyid, M. Ryass, 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. PT. Yasrif Watampone, Jakarta. Hal 59

pemerintah atau pelayanan yang tidak dapat diprivatisasikan maupun pelayanan publik atau pelayan yang dapat diberikan oleh pihak swasta termasuk memberikan pelayanan kepada korban bencana. Kedua pemberdayaan, pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kreatifitas masyarakat yang dapat bersaing dan berkompetisi untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ketiga fungsi pembangunan secara fisik merata dan menyeluruh dan pembangunan administrasi.

Sedangkan pemerintahan merupakan sistem, proses atau kegiatan yang dilaksanakan sebuah instansi dalam rangka pemenuhan atau pencapaian tujuan. Pemerintahan muncul konsekuensi adanya sebuah Negara, dalam rangka melaksanakan cita-cita Negara pemerintahan sebagai organisasi yang terbesar di dalam sebuah negara memerlukan sistem dan cara untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Syafie beranggapan bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utamanya, yaitu antara dua kelompok besar ini lahirlah hubungan pemerintahan yang ditunjukkan adanya gejala pemerintahan dapat berbentuk otokratis disuatu pihak atau demokratis dipihak lain.³⁰ Maksud teori tersebut jelas bahwa pemerintahan muncul karena konsekuensi terciptanya sebuah negara maka pemerintahan mutlak diperlukan sebagai proses, sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara yang dapat berbentuk kekuasaan satu orang (otokratis) maupun sebaliknya yaitu kekuasaan

³⁰ Syafie,. Op. Cit,. Hal 30

berada pada masyarakat (demokrasi) akan tetapi pada dasarnya disepakati oleh masyarakat.

2. Konsep dan Teori Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah dan pemerintahan dua kata yang berasal dari kata dasar yang sama yaitu “perintah”, kata yang pertama tidak memiliki akhiran sedangkan kata yang kedua memiliki akhiran “an”. Sekilas secara etimologi kata pemerintah dan pemerintahan tidak begitu memiliki perbedaan yang signifikan, namun secara terminologi kata pemerintah dan pemerintahan memiliki makna dan istilah yang sangat berbeda. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.³¹

Hampir sama dengan pendapat sebelumnya Suryaningrat menjelaskan Pemerintah dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah” yaitu:

- a. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
- b. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah.
- d. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah.³²

³¹ Ibid, Hal 20

³² Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 9

Dari dua teori pemerintah di atas, adanya dua pihak yang saling ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pihak yang pertama yang memberi perintah dan pihak yang kedua adalah yang menerima perintah, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memberikan perintah dan pihak yang diperintah harus menunjukkan kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan apa yang diperintah sepanjang sesuai dengan aturan yang ditentukan melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian jalinan hubungan emosional merupakan tonggak awal antara memberi dan menerima perintah

Bicara pemerintah secara umum berarti organ, lembaga, badan atau instansi mulai dari kedudukan tertinggi (pemerintah), sampai kedudukan yang terendah (pemerintah desa) dan unsur-unsur yang berada di dalamnya yang berwenang memberikan dan memproses pelayanan sipil dan pelayanan publik, karena pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat konsekuensi dari terciptanya sebuah negara yang disepakati dan diberikan amanat oleh rakyat untuk mengurus dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara³³.

”Ndraha mengatakan bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya.”³⁴

³³Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 21

³⁴Ndraha,.Op. Cit Hal 6

Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas yang menjelaskan bahwa pemerintah merupakan salah satu sub komponen geografis satu negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah tertentu³⁵. Beberapa teori pemerintah yang dijelaskan sebelumnya, ada dua hal penjelasan yang penulis simpulkan. Pertama, pemerintah hadir karena konsekuensi dari kemerdekaan sebuah negara yang berdaulat namun kegiatan dan proses dalam aplikasinya tersusun dan terorganisir serta memiliki payung hukum tertinggi (konstitusi).

Kedua, pemerintah sebagai organ, lembaga atau badan yang memiliki kewenangan memberikan pelayanan kepada setiap warga negaranya sesuai dengan konstitusi yang disetujui bersama. Pelayanan yang dimaksud disini menyentuh semua aspek termasuk pelayanan dalam memberikan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarana. Seperti yang dikemukakan oleh Awang dan Wijaya bahwa pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjadi dan menjamin sistem ketertiban dan penyedia sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktifitas sosialnya³⁶.

Dari sisi kebijakan publik pemerintah merupakan satu-satunya organ, badan atau instansi yang diberikan kewenangan untuk merumus dan menetapkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau acuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awang dan Wijaya mengatakan pemerintah adalah sebuah badan yang

³⁵Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal 25

³⁶Awang, Azam, Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau, Pekanbaru. Hal 7

menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara³⁷. Pendapat diatas menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah memiliki kewenangan merumus dan menetapkan serta mengimplementasikan kebijakan publik sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan secara berdaulat yang berpedomankan oleh hukum, adat istiadat dan institusi atau lembaga-lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Beberapa teori mendefenisikan pemerintah dalam secara luas dan secara sempit, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan oleh Kansil dan Christine memberikan penjelasan bahwa pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR³⁸. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga eksekutif yang lembaga yang bertugas mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, sedangkan terminologi pemerintah secara luas adalah seluruh organ atau badan baik *main state organ* maupun *auxeliry state organ*, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah hadir sebagai organ atau badan dengan sejumlah tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prajudi mengatakan tugas pemerintah adalah antara lain tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian

³⁷Ibid, Hal 6

³⁸Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta. Hal 150

lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintahan adalah pengaturan pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan³⁹. Tugas dan fungsi pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan tugas yang komplit dan menyeluruh, menyentuh berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat termasuk tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan.

Ndraha mengatakan, fungsi pemerintah, yang pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah semakin meningkat kondisi primer yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai *provider* jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi yang disingkat sebagai fungsi pelayanan (*servicing*). Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah⁴⁰.

Ada dua fungsi pemerintah yang dijelaskan oleh teori di atas, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer erat kaitannya fungsi pelayanan yang tidak dapat diprivatisasikan atau diserahkan kepada organisasi swasta, fungsi primer hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui pelayanan sipil dan

³⁹Syafiie,. Op. Cit,. Hal 33

⁴⁰Ndraha,.Op. Cit Hal 76

pelayanan birokrasi serta meningkatkan kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Kemudian, fungsi sekunder merupakan fungsi sebaliknya, yaitu fungsi yang bersifat negatif maksudnya dengan dilaksanakannya fungsi ekonomi, politik dan sosial maka berdampak semakin kuatnya bargaining position yang mengakibatkan pembaharuan masyarakat yang diperintah.

Pemerintah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas merupakan organ yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat. Rasyid mengatakan fungsi pemerintah secara hakiki yaitu memberikan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*)⁴¹. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga hal, pertama pemberian pelayanan baik itu pelayanan sipil yaitu pelayanan yang dimonopoli oleh pemerintah atau pelayanan yang tidak dapat diprivatisasikan maupun pelayanan publik atau pelayan yang dapat diberikan oleh pihak swasta termasuk memberikan pelayanan kepada korban bencana. Kedua pemberdayaan, pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kreatifitas masyarakat yang dapat bersaing dan berkompetisi untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ketiga fungsi pembangunan secara fisik merata dan menyeluruh dan pembangunan administrasi.

Sedangkan pemerintahan merupakan sistem, proses atau kegiatan yang dilaksanakan sebuah instansi dalam rangka pemenuhan atau pencapaian tujuan. Pemerintahan muncul konsekuensi adanya sebuah Negara, dalam rangka melaksanakan cita-cita Negara pemerintahan sebagai organisasi yang terbesar di

⁴¹Rasyid, M. Ryass, 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. PT. Yasrif Watampone, Jakarta. Hal 59

dalam sebuah negara memerlukan sistem dan cara untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Syafiie beranggapan bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utamanya, yaitu antara dua kelompok besar ini lahirlah hubungan pemerintahan yang ditunjukkan adanya gejala pemerintahan dapat berbentuk otokratis disuatu pihak atau demokratis dipihak lain⁴². Maksud teori tersebut jelas bahwa pemerintahan muncul karena konsekuensi terciptanya sebuah negara maka pemerintahan mutlak diperlukan sebagai proses, sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara yang dapat berbentuk kekuasaan satu orang (otokratis) maupun sebaliknya yaitu kekuasaan berada pada masyarakat (demokrasi) akan tetapi pada dasarnya disepakati oleh masyarakat.

3. Organisasi Pemerintahan

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja kelembagaan di Indonesia.⁴³

Kepemimpinan (*leadership*) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (*leader*) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-

⁴² Syafiie, Op. Cit., Hal 30

⁴³ Istianto, Bambang. 2009. Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media. Hal. 2.

unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang di inginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kepemimpinan yang ada di Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang baik sehingga Indonesiadapat menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap organisasi harus senantiasa mengevaluasi kinerjanya, melakukan perbaikan, agar tetap berkembang dan dapat bersaing. Perbaikan ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar organisasi itu semakin berkembang, dapat bersaing dan minimal dapat mempertahankan kualitas yang sulit diprediksi. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja organisasi adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah organisasi ditujukan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sedarmayanti mengungkapkan bahwa perilaku organisasi terdiri atas dua aspek yaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi.⁴⁴ Pemerintahan daerah organisasi berarti juga proses merubah, memperluas atau memperkecil organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi agar memberikan kontribusi positif bagi publik maupun *customers* sehingga kepuasan masyarakat dan pelanggan (*public and customers satisfaction*) yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan *public*

⁴⁴ Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) Jilid II. Bandung; Mandar Maju.

service dapat terpenuhi. Perubahan organisasi merupakan beralihnya kondisi organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju kondisi masa yang akan datang yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya.

Sedarmayanti menguraikan bahwa pemerintahan daerah organisasi dalam arti sempit meliputi kinerja organisasi, kerjasama operasional, sistem dan prosedur kerja serta pendelegasian wewenang dan otonomi. Sedangkan pemerintahan daerah organisasi dalam arti luas, mencakup seluruh aspek yang dimiliki perusahaan yaitu meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya termasuk sarana dan prasarana.

Perubahan organisasi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, perubahan organisasi menyangkut perubahan teknologi, karyawan atau struktur. Sedang secara eksternal, berkaitan dengan ancaman dan peluang yang terjadi di luar organisasi dan dapat mempengaruhi kegiatan dalam organisasi. Apabila perubahan dikelola secara tidak benar, maka akan menyebabkan menurunnya semangat kerja personil serta dapat menimbulkan konflik dalam organisasi.

Winardi mengungkapkan bahwa upaya perubahan organisasi dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari 3 fase yaitu fase pencairan (*unfreezing*), fase perubahan (*changing*) dan fase pembekuan kembali (*refreezing*).⁴⁵ Fase I merupakan tahapan dimana orang mempersiapkan sebuah situasi untuk perubahan. Fase II adalah mencakup tindakan modifikasi tugas-tugas, struktur, teknologi serta personil. Sedang fase III adalah upaya

⁴⁵ Winardi, J. 2004. *Motivasi & Pemotivasian Dalam Manajemen*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal. 4 & 9.

menstabilkan perubahan untuk memelihara perilaku individu dan organisasi. Dalam melakukan perubahan organisasi terdapat 3 cara untuk mencapai hasil secara tepat.

Cara tersebut adalah *reengineering*, pemerintahan daerah, dan inovasi. *Reengineering* mencakup upaya untuk memikirkan kembali dan mendesain proses bisnis guna meningkatkan efektivitas organisasi. Kegiatan ini merupakan penataan ulang secara fundamental untuk mendapatkan perbaikan kinerja seperti biaya, kualitas, dan pelayanan. Kegiatan *reengineering* dilakukan terhadap hal yang bersifat mendasar. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang bersifat terobosan baru yang berorientasi pada masa depan. Olehnya itu, dilakukan perubahan visi, misi, tujuan organisasi serta operasional organisasi. Pemerintahan daerah organisasi dapat berarti sempit dan dapat pula secara luas.

Kinerja yang optimal dapat tercapai dengan dukungan personil dan prestasi kelompok. Selanjutnya kerjasama operasional diharapkan dapat lebih harmonis dan situasi kerja akan lebih kondusif. Pemerintahan daerah juga menyangkut pendelegasian wewenang atau penataan kembali struktur organisasi sehingga organisasi menjadi responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Inovasi merupakan suatu proses dimana organisasi memanfaatkan keterampilan dan sumber daya mereka untuk mengembangkan barang-barang dan jasa baru, atau untuk mengembangkan produk dan sistem pengoperasian baru, hingga dengan demikian mereka lebih baik dapat bereaksi terhadap kebutuhan pelanggan mereka.

4. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Presiden Republik Indonesia Yang Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁴⁶

Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
- b. Diselenggarakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- d. Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya
- e. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. Dengan mendasarkan pelaksanaannya pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁴⁷

⁴⁶ Loc. Cit. Hlm.3

⁴⁷ Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, hlm.61

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa asas. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

- a. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Asas otonomi ini juga masih dibagi 2 (dua) yaitu :
 - 1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
 - 2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (pasal 1 dan 8).⁴⁸
- b. Asas tugas pembantuan (*medebewind*) adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/kota dan atau desa dipemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Adapun hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan tugas pembantuan ini adalah:
 - 1) Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat.
 - 2) Urusan yang secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat.
 - 3) Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektif pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
 - 4) Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.⁴⁹

4.1. Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

- a. Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

⁴⁸ Pasal 1 angka 7. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*

⁴⁹ *Ibid*, angka 9.

- b. Tertib Penyelenggara Negara, tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Kepentingan Umum, asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.
- e. Proporsionalitas, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efisiensi, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- i. Efektivitas, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- j. Keadilan, asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.⁵⁰

4.2. Teori Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

⁵⁰ Loc. Cit. Hlm.3

- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.⁵¹

Selain itu menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan sivil dan layanan birokrasi.

- b. Fungsi sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.⁵²

Selanjutnya Rasyid berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah:

- a. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

- b. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

- c. Fungsi pemberdayaan

⁵¹ Op. Cit. 75

⁵² Op. Cit, 25

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

d. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

5. Pemerintahan Desa

Pengertian Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Pasal 1 ayat (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usulan, dan/atau hak tradisional yang di akui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵³

Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Deddy Supriyadi Beratakusumah,

⁵³ A.S. Moenir. 2003. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta. Aksara. Hal 219

Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa. Istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat. Ia dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

Sedangkan menurut Yuliati, Desa adalah tempat asal, tempat tinggal negara asal, atau tanah leluhur yang merajuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan Norma, serta memiliki batas yang jelas.⁵⁴

Sedangkan menurut Tjenreng pemerintahan merupakan kumpulan dari pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi, Badan, lembaga atau pejabat negara yang telah ditetapkan dan dilakukan untuk kepentingan umum.⁵⁵

Selain itu pengertian pemerintahan menurut Manan dan Magnar dalam arti luas pemerintahan adalah semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam pengertian sempit pemerintahan adalah cabang kekuasaan eksekutif.

Menurut Wasistiono dan Tahir (dalam Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah) menyatakan bahwa karena organisasi pemerintah Desa semakin hari ternyata semakin tidak mampu untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka terjadilah suatu pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang berada pada kategori "relatif lambat", bahkan disana sini terjadi kemandegan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

⁵⁴Yuliati, 2003. Pemerintahan Desa, Raja Grafindo, hal : 24

⁵⁵Tjenreng. Bahadrudin. 2002. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta. CV Armaco. Hal 1

Untuk melakukan berbagai bentuk dari perubahan sosial di desa, maka masyarakat desa hanya seringkali bersifat menunggu aluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.⁵⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bab I Pasal (1) ayat (6) tentang pemerintahan desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam ayat (7) pasal (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menyebutkan bahwa pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian ayat (5) Pasal (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menyebutkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵⁶ Rauf Rahyunir dan Maulidiah Sri. 2015. Pemerintahan Desa. Pekanbaru. Nusa Media. Hlm. 22.

6. Kebijakan Publik

Leslie A. Pal dalam widodo mengkategorikan definisi kebijakan publik menjadi dua macam yaitu definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama kebijakan dan definisi yang lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah.⁵⁷ Definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama kebijakan menurut Leslie A. Pal dalam Widodo dapat diidentifikasi diantaranya yaitu :⁵⁸

- a. *A purposive course of action allowed by an actor or set of actors dealing with a problem or matter of concern.... public policies are those policies develop by governmental bodies an officials. (James E. Anderson);*
- b. *A set of interrelated decisions taken by the political actor or group of actors concerning the selection of goals and the mean of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actor to achieve. (W.I Jenkins);*
- c. *Public policy is whatever government choose to do or not to do (Thomas R. Dye);*
- d. *A Projected program of goal values and practices (Harold D. Laswell and Abraham Kaplan).*

Sementara kategory pengertian kebijakan yang lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah, diantaranya yaitu *“What government actually do and why (Richard Semeon), Action taken by government (Ira Sharkansky)”*.⁵⁹

Diantara pengertian yang telah disebutkan di atas hanya ada sedikit perbedaan, oleh karena itu Leslie A. Pal menyatakan bahwa kebijakan publik adalah :⁶⁰

“as a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems ”. Thomas R. Dye dalam Subarsono (2009:2) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (publik policy is what ever government choose to do or not to do)”.

⁵⁷ Widodo, Joko.2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Hlm 10.

⁵⁸ Loc.Cit Hlm 11.

⁵⁹ Ibid. Hlm 11

⁶⁰ Ibid. Hlm 12

Subarsono mengartikan kebijakan menurut Thomas R. Dye tersebut bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.⁶¹ Atas dasar pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson dalam Widodo (2010:14) yaitu :⁶²

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu;
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
- c. kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.;
- d. kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu);
- e. kebijakan publik (positif) selalu berdasarakan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :⁶³

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah;
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah;
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan;
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil;
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

⁶¹ AG Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 2.

⁶² Op. Cit, Widodo Tahun 2010, Hlm 14.

⁶³ Ibid. Subarsono Tahun 2009, Hlm 11.

Sedangkan menurut pakar kebijakan publik, James Anderson dalam Subarsono, menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:⁶⁴

- a. Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif – alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan kebijakan (*adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?
- d. Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- e. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Menurut pandangan Ripley dalam Subarsono bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari (1) Penyusunan agenda kebijakan, (2) Formulasi dan legitimasi kebijakan, (3) Implementasi kebijakan dan (4) Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, & dampak kebijakan.⁶⁵ Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, menurut Ripley dalam (Subarsono, 2009:11) menyatakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu:⁶⁶

- a. Membangun persepsi di kalangan stake holder bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap masalah;
- b. Membuat batasan masalah dan;
- c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut bisa masuk dalam agenda pemerintah.

⁶⁴ Ibid, Hlm 12

⁶⁵ Ibid. Subarsono, Hlm 11

⁶⁶ Loc. Cit. Hlm 12.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, Ripley dalam Subarsono mengatakan bahwa :⁶⁷

“Analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih”.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Ripley dalam Subarsono mengatakan bahwa :⁶⁸

“Pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik”.

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan.

7. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke

⁶⁷ Loc. Cit, Hlm 12

⁶⁸ Loc. Cit

proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.⁶⁹ Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa:⁷⁰

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

⁶⁹ Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo. Hlm 146-147.

⁷⁰ Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara, Hlm 65.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. **Teori George C. Edward Edward III** dalam Subarsono berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:⁷¹
 - a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
 - b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
 - c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
 - d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah

⁷¹ AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm 91-92.

Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.⁷²

Menurut Edward III dalam Widodo, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi.⁷³

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.⁷⁴ Menurut

⁷² Ibid, Widodo Tahun 2010, Hlm 197.

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid, Hlm 98

Edward III dalam Widodo bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III dalam Widodo menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*.⁷⁵

2) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*.⁷⁶

Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.⁷⁷

3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid, Hlm 101-103

implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan :

“Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed”.

4) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa:

“Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan”. Oleh karena itu, pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.⁷⁸

Edward III dalam Widodo mengatakan bahwa :

“jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut”.

⁷⁸ Ibid, Hlm 105-106.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:⁷⁹

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:⁸⁰

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

⁷⁹ Agustinus, leo. (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI. Hlm 159-160.

⁸⁰ Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo. Hlm 149-160.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.⁸¹

Menurut Edwards III dalam Winarno terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”.⁸² Menurut Winarno, ”Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :⁸³

“Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan”.

⁸¹ Ibid, Widodo, Tahun 2010, Hlm 106

⁸² Ibid, Winarno, Tahun 2005, Hlm 150

⁸³ Ibid, Hlm 107

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno menjelaskan bahwa.⁸⁴

“SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipetipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

Edward III dalam Winarno menjelaskan bahwa :⁸⁵

”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”

Edward III dalam Widodo, mengatakan bahwa:⁸⁶

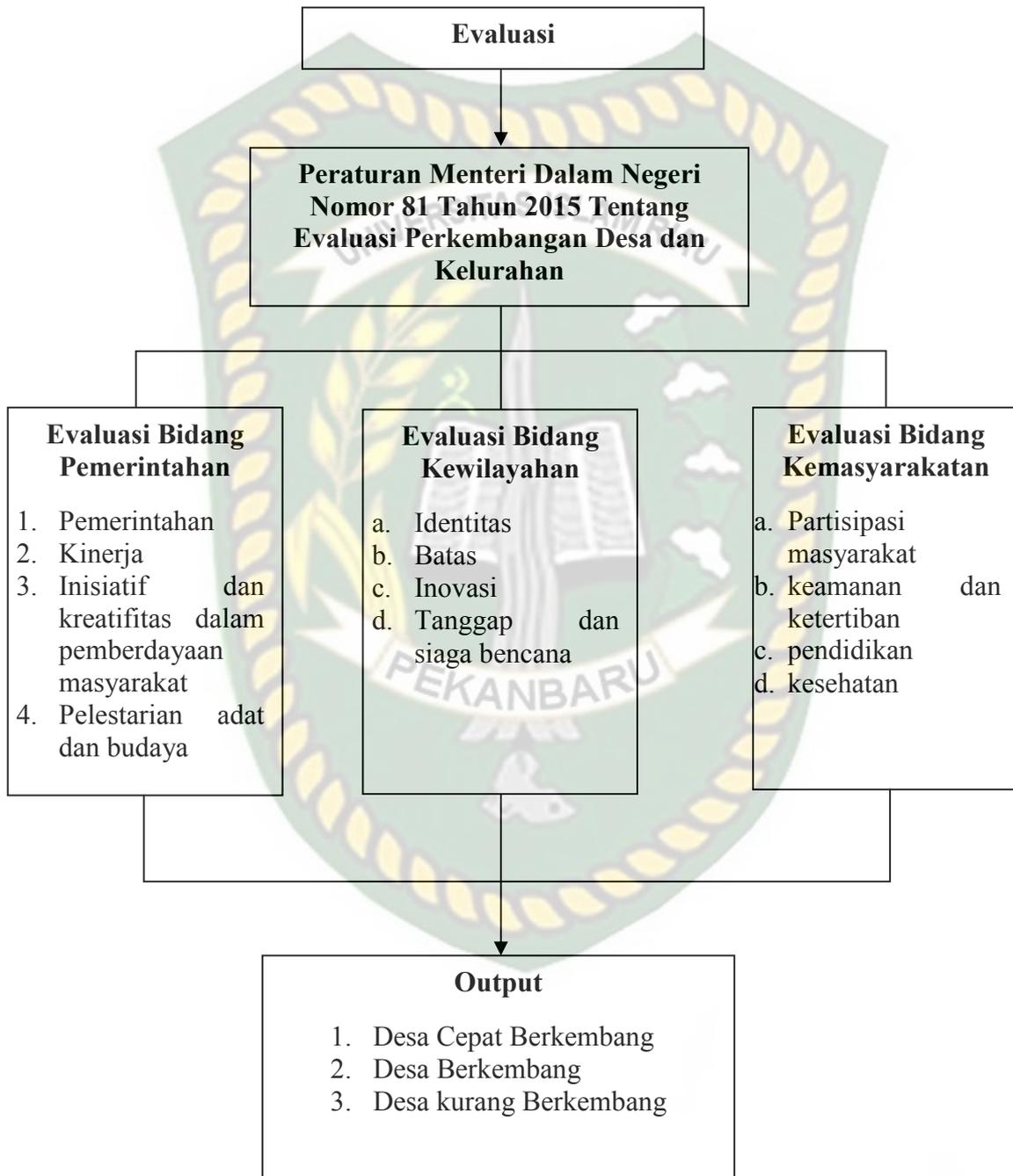
“Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.”

⁸⁴ Ibid, Winarno, 2005, Hlm 150.

⁸⁵ Op. Cit, Hlm 155

⁸⁶ Ibid, Widodo, 2010, Hlm 106

B. Kerangka Pemikiran



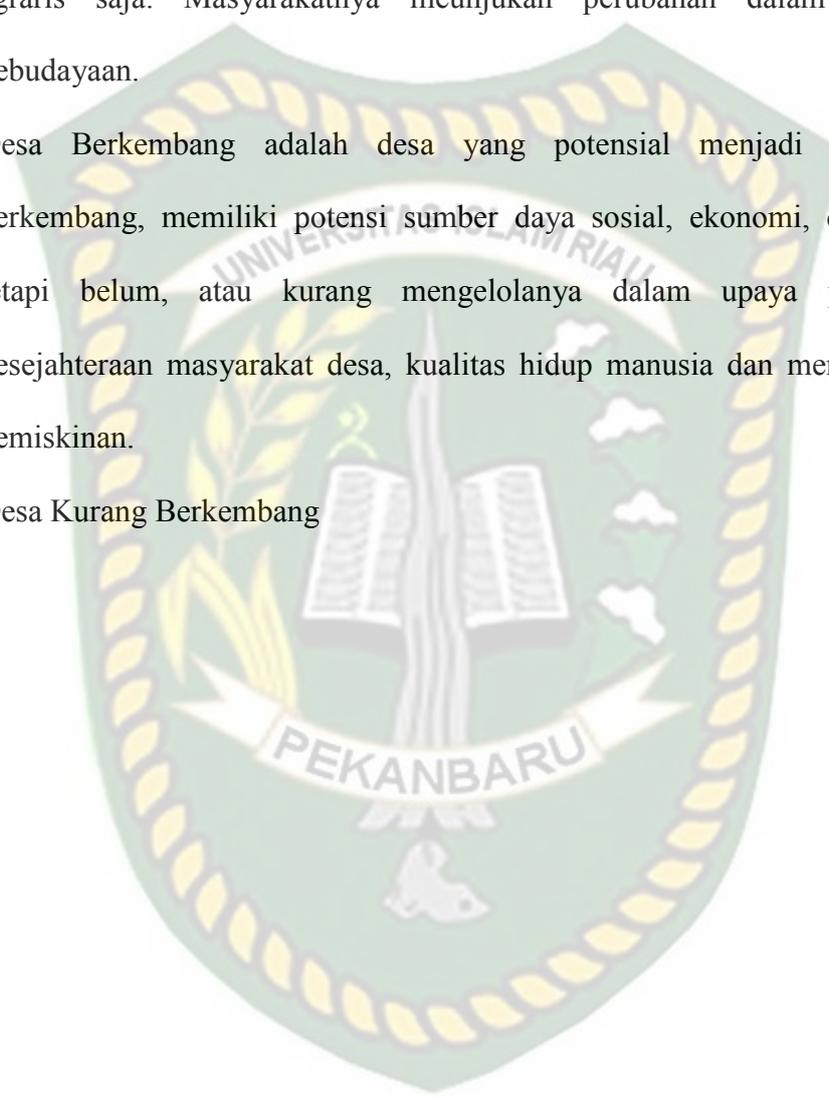
Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Studi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ukui)

C. Konsep Operasional

1. Kecamatan atau yang disebut oleh nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
2. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.
10. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
11. Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan.
12. Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan.
13. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim EPDesKel adalah kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan berdasarkan instrumen pada wilayah kerja yang telah ditentukan.

14. Desa Cepat Berkembang adalah desa yang dekat dan mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya meunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaan.
15. Desa Berkembang adalah desa yang potensial menjadi desa cepat berkembang, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
16. Desa Kurang Berkembang



BAB III

MOTODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawanannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁸⁷ Metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.⁸⁸ Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁸⁹ Menurut sugiyono pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

⁸⁷ Meleong, J. Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Hal.

135.

⁸⁸ Moleong. J. Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Hal.

6.

⁸⁹ Sugiyono. 2009. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung Alfabeta. Hal. 15

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁹⁰

Dalam upaya menemukan kebenaran objektif dan menyusunnya di dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sistematis, logis dan metodis, untuk mengetahui karakteristik dari metode ilmiah yaitu :

- a. penelitian harus sistematis tersusun secara teratur, berurutan menurut sistem.
- b. penelitian harus logis masuk akal benar menurut penalaran manusia.
- c. penelitian harus benar-benar bersifat empiris yang diperoleh melalui pengalaman (*common sense*) penemuan dan pengamatan.
- d. penelitian harus berdasarkan metode yang diakui kebenarannya di dalam penalaran sehingga menjadi penuntun di dalam penelitian.
- e. penelitian harus bersifat umum, mengeneralisasi meliputi keseluruhan tidak menyangkut yang khusus saja.
- f. harus akumulatif, yakni bertambah secara terus menerus, dinamis serta makin berkembang.

Dengan metode ini peneliti akan menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Dalam bahasa dan peristilahan beberapa ahli secara fundamental mendefinisikan metode kualitatif sebagai budaya dalam mencari ilmu pengetahuan sosial pada pengamatan manusia dalam pengawasannya sendiri secara fundamental. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati adalah ciri-ciri yang menggambarkan penelitian kualitatif.

⁹⁰ Loc. Cit. Hal 15

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Lokasi ini dipilih dikarenakan peneliti ingin melihat dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

C. Informan

Berdasarkan judul penelitian tersebut, dibawah ini telah ditetapkan informan yang akan menjadi sumber data primer, yaitu :

Tabel III.1 : Informan Penelitian

| No | Informan | Populasi | Responden | Keterangan |
|----|---------------------------------|----------|-----------|-------------------|
| 1 | Kepala Dinas PMD | 1 | 1 | Purposiv Sampling |
| 2 | Sekretaris Camat Ukui | 1 | 1 | Purposiv Sampling |
| 4 | Lurah Ukui Satu | 1 | 3 | Purposiv Sampling |
| 5 | Kepala Desa Ukui Dua | 12 | 3 | Purposiv Sampling |
| 6 | Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga | 12 | 3 | Purposiv Sampling |

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada seluruh informan/responden.⁹¹

2. Data sekunder

Data sekunder yang telah di olah berhubungan dengan penelitian ini. data ini diperoleh dari instansi yang terkait dengan objek penelitian, meliputi gambar umum struktur, organisasi, jumlah pegawai serta tugas-tugasnya, dan data yang didapatkan diolah oleh peneliti. Memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (teredia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan melalui organisasi dan perusahaan.⁹²

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metoda ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid.⁹³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, tujuan agar data dapat terkumpul. Maka dari itu penulis menggunakan metode yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu :

⁹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 10

⁹² Ruslan, 2013. Http :// seputar pengertian data.com, sabtu, 19 januari 2020, 20.34 Wib. Hlm. 29.

⁹³ Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta : Teras, Hal. 57.

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hubungan itu yehodaq dan kawan-kawan menjelaskan, pengamatan ataupun observasi akan menjadi alat dan pengumpulan data yang baik apabila : pertama, mengabdikan kepada tujuan penelitian. Kedua, direncanakan secara sistematis. Ketiga, dicatat dan dihubungkan dengan proposisi-proposisi yang umum. Keempat, dapat dicek dan dikontrol validitas, reliabilitas dan ketelitiannya.⁹⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melakukan wawancara langsung dengan informan mengenai pokok penelitian, wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan tujuan mendapatkan keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini juga berusaha untuk mengembangkan pertanyaan yang diajukan untuk menggali jawaban yang lebih mendalam. Sehingga dalam wawancara tersebut informan tidak merasa sedang dihakimi. Dengan wawancara mendalam diharapkan peneliti mendapatkan gambaran secara lebih jelas guna mempermudah analisa data selanjutnya.

⁹⁴ Abu Ahmadi dan Cholid Narbuko, 2009. Metodologi Penelitian, Jakarta, PT Bumi Aksara, Hlm.70

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti : monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Dalam penerapan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti menyusun instrumen. Dokumen yang dipergunakan dalam penelitian dapat dibagi menjadi dokumen pribadi yang berisi catatan-catatan yang bersifat pribadi, dokumen resmi yang berisi catatan-catatan yang bersifat formal.⁹⁵

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sutopo triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif.⁹⁶ Dalam kaitan ini Patton dalam Sutopo, menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu :⁹⁷

1. Triangulasi data (*data triangulation*) yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda.
2. Triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda;

⁹⁵ Moleong Lexy J, Op Cit, Hal, 208

⁹⁶ H.B. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.Hal. 7-8.

⁹⁷ Op. Cit. Sutopo. Hal. 78.

3. Triangulasi peneliti (*investigator triangulation*) yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti; dan
4. Triangulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori.

Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Menurut Miles dan Huberman, analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.⁹⁸

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu :

⁹⁸ Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992 Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

1. Reduksi data. Jika data atau informasi dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memberi kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Display data. Tujuan display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang bertumpuk banyak.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data maka menjadi lebih jelas sehingga menjamin validitas.
4. Triangulasi. Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁹⁹ Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumen.¹⁰⁰ Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai

⁹⁹ Meleong, J. Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 330.

¹⁰⁰ Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik. Bandung : Tarsito. Hal. 115.

tuntas, sehingga datanya jenuh.¹⁰¹ Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

G. Jadwal Penelitian

Tabel III.1 : Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Studi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ukui)

| No | Jenis Kegiatan | Bulan/ Minggu Ke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|
| | | Juli 2020 | | | | Agustus 2020 | | | | Oktober 2020 | | | | November 2020 | | | | Desember 2020 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persiapan dan Penyusunan Usulan Persiapan | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Usulan Penelitian | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penelitian Lapangan | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 5 | Bimbingan Tesis | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | |
| 6 | Ujian Tesis | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 7 | Revisi Dan Pengesahan Tesis | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 8 | Penyerahan Tesis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |

Catatan : Penelitian ini bersifat tentative sehingga dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian

¹⁰¹ Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992 Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Identitas Informan

Pengenalan informan merupakan tahapan pertama dan merupakan fokus dari penelitian ini. Melalui pengenalan informan, penulis dapat mengumpulkan sebagian data pendukung seperti identitas informan secara mendalam mulai dari latar belakang pendidikan, umur, jabatan dan Jenis kelamin sehingga dapat memberikan sedikit gambaran secara psikologi mengenai karakteristik dan potensi informan. Dalam penelitian ini penentuan informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yakni menentukan informan secara kebetulan atau sengaja berdasarkan karakteristik atau kapasitas informan yang mengacu kepada kompetensi yang dimiliki informan dalam memberikan informasi atau keterangan terkait wawancara yang diajukan nantinya.

Berikut ini adalah deskripsi dari sembilan orang informan yang telah memenuhi Identitas Informan memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Tabel IV.1. Daftar informan

| No | Informan | Populasi | Responden | Keterangan |
|----|---------------------------------|----------|-----------|-------------------|
| 1 | Kepala Dinas PMD | 1 | 1 | Purposiv Sampling |
| 2 | Sekretaris Camat Ukui | 1 | 1 | Purposiv Sampling |
| 4 | Lurah Ukui Satu | 1 | 3 | Purposiv Sampling |
| 5 | Kepala Desa Ukui Dua | 12 | 3 | Purposiv Sampling |
| 6 | Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga | 12 | 3 | Purposiv Sampling |

Sumber : Olahan Data Penelitian Tahun 2020

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Ukui yang ibukotanya Pangkalan Kerinci merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan yang berada di Pulau Sumatera, dengan memiliki batas-batas wilayah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lesung.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lesung.

Sedangkan letak wilayahnya adalah : 00°07 Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara 12°08 Bujur Timur s/d 101°43'26" Bujur Timur Kecamatan Ukui memiliki jumlah penduduk lebih kurang 31.729 Jiwa dengan luas wilayah 1.087,42 Km.

Secara keseluruhan Kecamatan Ukui terdiri dari 11 desa/kelurahan yang status hukumnya sudah menjadi desa/kelurahan defenitif. Adapun dari seluruh desa/kelurahan tersebut terdiri dari 28 Dusun, 190 Rukun tetangga (RT) dan 51 Rukun Warga (RW). Secara Topografi Kecamatan Ukui memiliki lokasi datar sampai berombak 48 % dan berombak sampai berbukit 52 %. dengan ketinggian 7,3 meter dari permukaan laut, yang berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan, perkebunan maupun hortikultura paktor yang besar budidaya perkebunan. Kecamatan Ukui memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh sifat-sifat angin musim dengan jumlah curah hujan berkisar 2.200 mm sampai 3000 pertahun. temperatur rata-rata 22°C - 32°C dan kelembapan nisbi antara 80-88%.

Pada tanggal 17, 18 dan 20 November 2020, dilakukan observasi di Kelurahan Ukui, Desa Ukui Dua dan Desa Kembang Bunga. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan data sekunder penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian lapangan tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data sekunder yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Data ini disajikan melalui tabel untuk selanjutnya akan diuraikan dan diulas melalui argumentasi sehingga akan memberikan gambaran/kesimpulan sementara, yang pada gilirannya nanti akan digunakan sebagai pisau analisis dalam membuat konklusi hasil penelitian ini.

Tabel IV. 2 : Presentase Luas Wilayah Dan Persentase Luas Wilayah Desa/Keluraha Di Kecamatan Ukui Tahun 2019

| No | Desa/Kelurahan | Luas (KM ²) | Persentase Terhadap Luas Kecamatan |
|----|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| 1 | Silikuan Hulu | 15,28 | 2,48 |
| 2 | Lubuk Kembang Sari | 19,8 | 3,22 |
| 3 | Lubuk Kembang Bunga | 15,28 | 2,48 |
| 4 | Air Hitam | 214,57 | 34,88 |
| 5 | Kampung Baru | 11,56 | 1,88 |
| 6 | Kelurahan Ukui | 18,95 | 3,08 |
| 7 | Ukui Dua | 257,04 | 41,79 |
| 8 | Bukit Gajah | 19,87 | 3,23 |
| 9 | Bukit Jaya | 11,19 | 1,82 |
| 10 | Bukit Emas | 13,25 | 2,15 |
| 11 | Tri Mulya Jaya | 5,82 | 0,95 |
| 12 | Bagan Limau | 12,47 | 2,03 |
| | Ukui | 615,08 | 100,00 |

Sumber : Kecamatan Ukui

Pada tabel IV. 2 dapat diketahui presentase luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui. Wilayah terluas berada di Desa Air Hitam dan Desa Ukui Dua,

dibandingkan dengan wilayah Desa lainnya. Hal ini di karenakan sebageian besar luas wilayah Desa Air Hitam dan Desa Ukui Dua adalah bagian dari wilayah Taman Nasional Teso Nilo (TNTN). Tentunya luas wilayah suatu Desa akan mempengaruhi jumlah besaran Dana Desa yang diterima oleh suatu desa, karena dengan luasnya wilayah suatu, maka akan semakin besar tugas dan tanggungjawabnya penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa tersebut, dan hal ini tentu akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Desa dalam meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM).

Tabel IV. 3 : Jarak Tempuh Dari Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui ke Kantor Bupati dan ke Kantor Camat (Km) Tahun 2019

| No | Desa/Kelurahan | Ke Kantor Bupati | Ke Kantor Camat |
|----|---------------------|------------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| 1 | Silikuan Hulu | 100 | 20 |
| 2 | Lubuk Kembang Sari | 95 | 21 |
| 3 | Lubuk Kembang Bunga | 95 | 29 |
| 4 | Air Hitam | 89 | 25 |
| 5 | Kampung Baru | 90 | 18 |
| 6 | Kelurahan Ukui | 75 | - |
| 7 | Ukui Dua | 80 | 6 |
| 8 | Bukit Gajah | 78 | 7 |
| 9 | Bukit Jaya | 80 | 12 |
| 10 | Bukit Emas | 72 | 10 |
| 11 | Tri Mulya Jaya | 95 | 14 |
| 12 | Bagan Limau | 95 | 30 |
| | Ukui | 65 | - |

Sumber : Kecamatan Ukui

Pada tabel IV. 3 dapat diketahui jarak tempuh dari Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui ke Kantor Bupati dan ke Kantor Camat. Untuk jarak terjauh Desa ke kantor Bupati ditempati oleh Desa Silikuan Hulu yaitu berjarak 100 Km, Desa Kembang Bunga, Desa Kembang Sari, Desa Tri Mulya dan Desa Bagan

Limau berjarak 95 Km, dan seterusnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya untuk jarak terjauh Desa ke Kantor Camat Ukui ditempati oleh Desa Bagan Limau yaitu berjarak 30 Km, di susul Desa Kembang Bunga 29 Km dan Desa Air Hitam 25 Km. Seterusnya dapat dilihat pada tabel tersebut.

Tabel IV. 4 : Status Pemerintahan dan Jumlah RT/RW Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui Tahun 2019

| No | Desa/Kelurahan | Status Pemerintahan | Rukun Warga | Rukun Tetangga |
|----|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Silikuan Hulu | Desa | 6 | 18 |
| 2 | Lubuk Kembang Sari | Desa | 6 | 25 |
| 3 | Lubuk Kembang Bunga | Desa | 8 | 32 |
| 4 | Air Hitam | Desa | 4 | 14 |
| 5 | Kampung Baru | Desa | 6 | 16 |
| 6 | Kelurahan Ukui Satu | Kelurahan | 11 | 29 |
| 7 | Ukui Dua | Desa | 7 | - |
| 8 | Bukit Gajah | Desa | 6 | 24 |
| 9 | Bukit Jaya | Desa | 5 | 18 |
| 10 | Bukit Emas | Desa | 4 | 20 |
| 11 | Tri Mulya Jaya | Desa | 4 | 14 |
| 12 | Bagan Limau | Desa | 5 | 20 |

Sumber : Kecamatan Ukui

Pada tabel IV. 4 dapat diketahui status pemerintahan dan jumlah RT/RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui. Status pemerintahan di Kecamatan Ukui memiliki sebelas Desa dan satu Kelurahan. Untuk Rukun Warga terbanyak terdapat di Kelurahan Ukui yaitu 11 RW, disusul oleh Desa Kembang Bunga 8 RW dan seterusnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian untuk jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Kembang Bunga yaitu 23 RT, disusul oleh Kelurahan Ukui memiliki 29 RT dan Desa Kembang Sari 25 RT, untuk seterusnya dapat dilihat pada tabel tersebut.

Tabel IV. 5 : Daftar Identitas Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Ukui Akhir Tahun 2019

| No | Desa/Kelurahan | Nama | Pendidikan Akhir |
|----|---------------------|------------------|------------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| 1 | Silikuan Hulu | Sarlin | S1 |
| 2 | Lubuk Kembang Sari | M. Iwan Kusmawan | SMA |
| 3 | Lubuk Kembang Bunga | Ir. Rusi, CS | S1 |
| 4 | Air Hitam | Tansi Sitorus | SMA |
| 5 | Kampung Baru | Taryo | SMA |
| 6 | Kelurahan Ukui Satu | Nasrun | SMA |
| 7 | Ukui Dua | Tarmizi | S1 |
| 8 | Bukit Gajah | Taryam | S1 |
| 9 | Bukit Jaya | Iswanjana | S1 |
| 10 | Bukit Emas | Agus Pamuji | SMA |
| 11 | Tri Mulya Jaya | Rustam | SMA |
| 12 | Bagan Limau | Parsana | SMA |

Sumber : Kecamatan Ukui

Pada tabel IV. 5 dapat diketahui Kepala Desa di Kecamatan Ukui, namun hal yang menarik disini yaitu dapat diketahui latar pendidikan dari masing-masing Kepala Desa tersebut. Kepala Desa yang memiliki pendidikan Sarjana (S1) terdapat lima orang yang meliputi Kepala Desa Silikuan Hulu, Kembang Bunga, Ukui Dua, Bukit Gajah dan Desa Bukit Jaya. Sedangkan sisanya memiliki pendidikan akhir Sekolah Menengah Atas (SMA). Memang tidak ada jaminan bahwa seseorang yang berpendidikan lebih rendah tidak akan mampu/bisa dalam memajukan/meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM), karena hal ini telah terbukti bahwa dari sebelas Desa yang ada di Kecamatan Ukui, tujuh Desa telah berstatus Desa Mandiri yang enam Desa diantaranya di pimpin oleh Kepala Desa yang berlatar pendidikan Sekolah menengah Atas (SMA), dan empat Desa lainnya masih berstatus Desa Maju yang 3 diantaranya dipimpin oleh Kepala Desa yang berlatar pendidikan Sarjana (S1).

Tabel IV. 6 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui Tahun 2019

| No | Desa/Kelurahan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Silikuan Hulu | 1205 | 1204 | 2409 |
| 2 | Lubuk Kembang Sari | 1647 | 1619 | 3266 |
| 3 | Lubuk Kembang Bunga | 2216 | 1697 | 3913 |
| 4 | Air Hitam | 2198 | 1936 | 4134 |
| 5 | Kampung Baru | 1558 | 1472 | 3030 |
| 6 | Kelurahan Ukui Satu | 3146 | 2976 | 6122 |
| 7 | Ukui Dua | 3744 | 3281 | 7025 |
| 8 | Bukit Gajah | 1851 | 1784 | 3635 |
| 9 | Bukit Jaya | 1035 | 985 | 2020 |
| 10 | Bukit Emas | 1257 | 1186 | 2443 |
| 11 | Tri Mulya Jaya | 874 | 746 | 1620 |
| 12 | Bagan Limau | 860 | 727 | 1587 |
| | Ukui | 21.591 | 19.613 | 41.204 |

Sumber : Kecamatan Ukui

Pada tabel IV. 6 dapat diketahui jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui tahun 2020. Total jumlah penduduk Se Kecamatan Ukui sebanyak 41.204 Jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21.591 dan 19.613 jenis kelamin perempuan. Untuk Desa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Ukui Dua dengan penduduk jenis kelamin laki-laki 3744 dan 3281 jenis kelamin perempuan. Diikuti Kelurahan Ukui Satu yaitu 3146 jenis kelamin laki-laki dan 2976 jenis kelamin perempuan, dan terbanyak ketiga ditempati oleh Desa Air Hitam 2198 jenis kelamin laki-laki dan 1936 jenis kelamin perempuan dan untuk desa lainnya dapat dilihat pada tabel tersebut.

Tabel IV.7 : Jumlah Sekolah Umum Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ukui Tahun 2019

| No | Desa/Kelurahan | TK | SD | | SMP | |
|----|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Silikuan Hulu | 2 | 2 | - | - | - |
| 2 | Lubuk Kembang Sari | 2 | 2 | - | 1 | - |
| 3 | Lubuk Kembang Bunga | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 4 | Air Hitam | 1 | 1 | - | - | - |
| 5 | Kampung Baru | 2 | 1 | - | - | - |
| 6 | Kelurahan Ukui Satu | 1 | 3 | - | - | - |
| 7 | Ukui Dua | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 8 | Bukit Gajah | 2 | 2 | - | 1 | - |
| 9 | Bukit Jaya | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 10 | Bukit Emas | 1 | 1 | - | - | - |
| 11 | Tri Mulya Jaya | 2 | 1 | - | - | - |
| 12 | Bagan Limau | - | 1 | 1 | - | - |
| | Ukui | 18 | 18 | 4 | 5 | 0 |

Sumber : Kecamatan Ukui

Pada tabel IV. 7 dapat diketahui jumlah sekolah umum menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Ukui tahun 2019. Bahwa jumlah sekolah dan jarak sekolah yang ada di Desa Se Kecamatan Ukui akan mempengaruhi dalam indikator penilain Indeks Desa Membangun (IDM). Semakin banyak dan semakin dekatnya jarak fasilitas pendidikan di suatu Desa, maka akan semakin tinggi skor didalam Indeks Ketahanan Sosial, hal ini berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Permendes No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Maka dapat dilihat jumlah sekolah terbanyak pada tabel tersebut sehingga dapat diketahui potensi Desa dalam Indeks Desa Membangun nya.

Tabel IV. 8 : Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui Tahun 2019

| No | Desa/Kelurahan | SARANA KESEHATAN | | | | | | | |
|----|---------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | Rumah Sakit | Rumah Bersalin | Praktek Dokter | Balai Pengobatan/ Poliklinik | Puskemas | Puskesmas Pembantu | Poskesdes/Polindes | Posyandu |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Silikuan Hulu | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 2 | Lubuk Kembang Sari | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 3 | Lubuk Kembang Bunga | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 4 | Air Hitam | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 5 | Kampung Baru | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 6 | Ukui Satu | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 3 |
| 7 | Ukui Dua | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
| 8 | Bukit Gajah | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 9 | Bukit Jaya | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 10 | Bukit Emas | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 11 | Tri Mulya Jaya | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 12 | Bagan Limau | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| | Ukui | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 45 |

Sumber : Kecamatan Ukui Tahun 2019

Pada tabel IV. 8 dapat diketahui jumlah sarana kesehatan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui Tahun 2019. Bahwa jumlah sarana yang ada di Desa Se Kecamatan Ukui akan mempengaruhi dalam indikator penilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Semakin banyak dan semakin dekatnya jarak sarana kesehatan, jumlah dokter di suatu Desa, maka akan semakin tinggi skor didalam Indeks Ketahanan Sosial, hal ini berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Permendes No. 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Maka dapat dilihat jumlah sarana kesehatan terbanyak pada tabel tersebut sehingga dapat diketahui potensi Desa dalam Indeks Desa Membangun nya.

Tabel IV. 9 : Jumlah Sarana Perekonomian di Kecamatan Ukui

| No | Desa/Kelurahan | Minimarket | Toko/Warung Kelontongan | Warung/ Kedai Makanan | Restoran/ Rumah Makan | Penginapan/Wisma |
|----|--------------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | - | - |
| 1 | Silikuan Hulu | - | 16 | - | - | - |
| 2 | Lubuk Kembang Sari | - | 25 | 5 | - | - |
| 3 | Lubuk Kembang | - | 5 | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------|------------|-----------|----------|----------|
| | Bunga | | | | | |
| 4 | Air Hitam | - | 2 | 5 | 3 | - |
| 5 | Kampung Baru | - | 1 | 4 | - | - |
| 6 | Ukui Satu | 5 | 10 | 8 | - | 1 |
| 7 | Ukui Dua | - | 10 | 5 | - | - |
| 8 | Bukit Gajah | - | 10 | 4 | - | - |
| 9 | Bukit Jaya | - | - | 9 | - | - |
| 10 | Bukit Emas | - | 11 | 6 | 2 | - |
| 11 | Tri Mulya Jaya | 2 | 15 | 4 | - | - |
| 12 | Bagan Limau | - | 10 | 2 | - | - |
| | Ukui | 7 | 121 | 52 | 5 | 1 |

Sumber : Kecamatan Ukui Tahun 2019

Pada tabel IV. 9 dapat diketahui jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Ukui, hal ini perlu untuk diketahui karena ketersediaan jumlah sarana perekonomian yang ada di Desa seperti Minimarket, Toko, Warung Makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan akan mempengaruhi pada Indeks Ketahanan Ekonomi, hal ini dianggap bahwa desa tersebut telah maju bahkan jika dapat meningkatkan potensi desanya secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Desa tersebut akan menjadi Desa Mandiri. Hal ini dikarenakan salah satu indikator dalam Indeks Desa membangun berorientasi pada ketahanan ekonomi Desa.

Tabel IV. 10 : Jumlah Sarana Komunikasi dan Informasi di Kecamatan Ukui Tahun 2019

| No | Desa/Kelurahan | Kantor Pos | Warung Internet | Base Transceiver Station (BTS) |
|----|---------------------|------------|-----------------|--------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Silikuan Hulu | - | - | 3 |
| 2 | Lubuk Kembang Sari | - | - | - |
| 3 | Lubuk Kembang Bunga | - | - | - |
| 4 | Air Hitam | - | - | 1 |
| 5 | Kampung Baru | - | - | 2 |
| 6 | Ukui Satu | 1 | 4 | 9 |
| 7 | Ukui Dua | - | 2 | - |
| 8 | Bukit Gajah | - | - | 1 |
| 9 | Bukit Jaya | - | - | 2 |
| 10 | Bukit Emas | - | - | 1 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------|----------|-----------|
| 11 | Tri Mulya Jaya | - | 1 | - |
| 12 | Bagan Limau | - | - | - |
| Ukui | | 1 | 7 | 19 |

Sumber : Kecamatan Ukui

Pada tabel IV. 10 dapat diketahui Sarana Komunikasi dan Informasi di Kecamatan Ukui, hal ini perlu untuk diketahui karena ketersediaan jumlah sarana komunikasi yang ada di Desa seperti Kantor Pos, Warung Internet akan mempengaruhi pada Indeks Ketahanan Ekonomi, hal ini dianggap bahwa desa tersebut telah maju bahkan jika dapat meningkatkan potensi desa pada bidang lainnya secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Desa tersebut akan menjadi Desa Mandiri. Hal ini dikarenakan salah satu indikator dalam Indeks Desa membangun berorientasi pada ketahanan ekonomi Desa.

Tabel IV. 11 : Jumlah Koperasi Aktif Menurut Jenis Koprasi di Kecamatan Ukui Tahun 2019

| No | Desa/Kelurahan | Koprasi Unit Desa (KUD) | Koprasi Simpan Pinjam | Koperasi Lainnya |
|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Silikuan Hulu | 1 | - | - |
| 2 | Lubuk Kembang Sari | 1 | - | - |
| 3 | Lubuk Kembang Bunga | 1 | - | - |
| 4 | Air Hitam | - | - | - |
| 5 | Kampung Baru | 1 | - | - |
| 6 | Ukui Satu | - | 1 | 1 |
| 7 | Ukui Dua | 1 | - | - |
| 8 | Bukit Gajah | 1 | - | - |
| 9 | Bukit Jaya | 1 | 2 | - |
| 10 | Bukit Emas | 1 | - | - |
| 11 | Tri Mulya Jaya | 1 | - | - |
| 12 | Bagan Limau | 1 | - | - |
| Ukui | | 9 | 3 | 1 |

Sumber : Kecamatan Ukui

Pada tabel IV. 11 dapat diketahui jumlah koperasi aktif menurut jenis Koprasi di Kecamatan Ukui. Hal ini perlu untuk diketahui karena ketersediaan jumlah Koperasi Aktif yang ada di Desa seperti Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam akan mempengaruhi pada Indeks Ketahanan Ekonomi, hal ini dianggap bahwa desa tersebut telah maju bahkan jika dapat meningkatkan potensi desa pada bidang lainnya secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Desa tersebut akan menjadi Desa Mandiri. Hal ini dikarenakan slaah satu indikator dalam Indeks Desa membangun berorientasi pada ketahanan ekonomi Desa.

Tabel IV. 12 : Jumlah Bank Menurut Jenis Bank di Kecamatan Ukui Tahun 2019

| No | Desa/Kelurahan | Bank Umum Pemerintah | Bank Umum Swasta | Bank Perkreditan Rakyat |
|----|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Silikuan Hulu | - | - | - |
| 2 | Lubuk Kembang Sari | - | - | - |
| 3 | Lubuk Kembang Bunga | - | - | - |
| 4 | Air Hitam | - | - | - |
| 5 | Kampung Baru | - | - | - |
| 6 | Ukui Satu | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Ukui Dua | - | - | - |
| 8 | Bukit Gajah | - | - | - |
| 9 | Bukit Jaya | - | - | - |
| 10 | Bukit Emas | - | - | - |
| 11 | Tri Mulya Jaya | 1 | - | - |
| 12 | Bagan Limau | - | - | - |
| | Ukui | 4 | 2 | 1 |

Sumber : Kecamatan Ukui

Pada tabel IV. 12 dapat diketahui jumlah Bank menurut jenis Bank di Kecamatan Ukui. Hal ini perlu untuk diketahui karena ketersediaan jumlah Bank akan mempengaruhi pada Indeks Ketahanan Ekonomi, hal ini dianggap bahwa

desa tersebut telah maju bahkan jika dapat meningkatkan potensi desa pada bidang lainnya secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Desa tersebut akan menjadi Desa Mandiri. Hal ini dikarenakan salah satu indikator dalam Indeks Desa membangun berorientasi pada ketahanan ekonomi Desa.

C. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan mengungkap, menjelaskan, dan membahas analisis data dan hasil penelitian mengenai “Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Studi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ukui)”. Hasil penelitian akan diuraikan secara bertahap mengacu pada data dan informasi yang didapatkan melalui 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari ke 3 (tiga) teknik pengumpulan data tersebut telah peneliti dapatkan data yang di perlukan seperti data primer dan data sekunder, data tersebut didapatkan dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian pada tanggal 17, 18 dan 20 November 2020 dengan terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian. Observasi yang kemudian dilanjutkan dengan menemui seluruh informan untuk melakukan wawancara dan melakukan dokumentasi.

Sebelum tiba pada analisis hasil penelitian, peneliti ingin menjelaskan beberapa hal dalam penulisan tesis ini, penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah yang tentunya dalam kaidah penulisan pedoman tesis, kedua rumusan

masalah tersebut harus terjawab dengan argumentasi dan analisis berdasarkan temuan yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta dikaitkan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Studi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ukui).

Rumusan masalah itu sendiri bertujuan untuk memberikan benang merah dalam penelitian ini sekaligus gambaran permasalahan yang harus dicari dan dikaji secara metodologis, melalui pendekatan-pendekatan teori yang koheren dan relevan.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian ilmiah harus berdasarkan teori (Grand Teori) ataupun indikator sebagai instrumen yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berguna dalam sebuah penelitian karena akan memenuhi kaidah-kaidah keilmuaan dalam penelitian sekaligus menguji konsep teori itu sendiri. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi instrumen dalam Permendagri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan yang terdiri dari :

1. Evaluasi Bidang Pemerintahan
2. Evaluasi Bidang Kewilayahan
3. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan

Ke 3 (tiga) indikator tersebut menjadi dasar peneliti untuk mengembangkan beberapa pertanyaan wawancara penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan menjadi instrumen untuk menuntun peneliti dalam mengumpulkan

informasi dari semua informan. Berikut pertanyaan menurut ke 3 (tiga) indikator tersebut :

1. Evaluasi Bidang Pemerintahan

a. Pemerintahan :

Bagaimanakah status pemerintahan Kelurahan Ukui Satu saat ini ?

b. Kinerja : Bagaimanakah kinerja pemerintahan Kelurahan Ukui Satu saat ini dalam melayani masyarakat ?

c. Desa dan Kelurahan berbasis teknologi informasi E-Government :

Apakah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Ukui Satu telah berbasis teknologi informasi E-Government ?

2. Evaluasi Bidang Kewilayahan

a. Identitas :

b. Batas :

Bagaimanakah keadaan dan batas-batas wilayah Kelurahan Ukui Satu saat ini ?

c. Inovasi :

Apakah ada inovasi yang dilakukan pemerintahan Kelurahan Ukui Satu terkait kewilayahnya ?

d. Tanggap dan siaga bencana :

Bagaimanakah ketanggap siagaan pemerintahan Kelurahan Ukui dalam menghadapi potensi bencana di wilayahnya ?

3. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan

a. Partisipasi masyarakat :

Bagaimanakah partisipasi masyarakat di Kelurahan Ukui Satu ?

b. Keamanan dan ketertiban :

Bagaimanakah situasi keamanan dan ketertiban di Kelurahan Ukui Satu ?

c. Pendidikan :

Bagaimanakah ketersediaan fasilitas pendidikan di Kelurahan Ukui Satu ?

d. Kesehatan :

Bagaimanakah ketersediaan fasilitas kesehatan di Kelurahan Ukui Satu ?

Dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17, 18 dan 20 November 2020 dengan menggunakan instrumen indikator evaluasi yang diatur didalam Permendagri No. 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan, yang meliputi evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

C. Hasil Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan turun langsung ke lokasi penelitian pada tanggal 17, 18, dan 20 November 2020, tahapan ini merupakan rangkaian upaya yang perlu dilakukan untuk menemui informan serta menggali dan mengumpulkan informasi data yang relevan dengan penelitian ini. Setelah informasi dan data telah didapatkan, maka selanjutnya dibawah ini akan diuraikan rekapitulasi hasil penelitian berdasarkan pengelompokkan setiap indikator dan desa.

C. 1. Kelurahan Ukui Satu

1. Evaluasi Bidang Pemerintahan

a. Pemerintahan

Evaluasi bidang pemerintahan merupakan salah satu indikator penilaian terhadap perkembangan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Ukui, untuk itu dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara terkait indikator yang kemudian akan dihubungkan dengan data sekunder untuk selanjutnya dianalisis.

Wawancara dpertama dilakukan pada tanggal 17 November 2020, peneliti menemui Lurah Ukui Satu dan Sekretaris Camat Ukui. Hasil wawancara akan diuraikan dibawah ini.

Bagaimanakah status Kelurahan Ukui Satu pada saat ini ?

“Pada tahun ini Kelurahan Ukui Satu telah menjadi kelurahan yang berkembang, hal ini sesuai dengan data pada tahun 2020 yang menempaykan Kelurahan berkembang kategori mula.”¹⁰²

Lebih lanjut pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Sekretaris Camat Ukui, ketika diwawancarai pada tanggal 17 November 2020, berikut hasil wawancaranya :

“Kelurahan Ukui saat ini berstatus Swadaya dengan kategori mula. Jika dilihat Kelurahan Ukui memang masih belum menunjukkan perkembangan yang baik dalam beberapa tahun ini, pada tahun 2018 Kelurahan Ukui masih dinilai kurang berkembang, tahun 2019 masih kurang berkembang.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada 2 (dua), tahun terakhir Kelurahan Ukui dinilai sebagai kelurahan yang kurang berkembang, hingga pada tahun 2019 kelurahan ukui telah menjadi kelurahan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Lurah Ukui Satu Pada Tanggal 17 November 2020

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Sekcam Ukui Pada Tanggal 17 November 2020.

berkembang. Jika merujuk pada Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, ada 3 (tiga) bidang yang dilinai dari perkembangan Desa/Kelurahan, yaitu evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan. Namun sebelum tiba pada analisis lebih dalam, sebelumnya akan di uraikan lebih dalam lagi hasil penelitian ini agar lebih objektif dan kuat dalam penalarannya.

b. Kinerja

Selanjutnya mengenai pertanyaan kedua yang diajukan kepada Lurah Ukui Satu, pertanyaan yang diajukan mengenai : Bagaimanakah kinerja pemerintahan Kelurahan Ukui Satu jika dilihat daribeberapa tahun belakangan ini ?

“Kinerja Kelurahan Ukui Satu sudah baik, hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat saat melakukan pengurusan disini, pegawai telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada.”¹⁰⁴

Lebih lanjut di waktu yang berbeda Sekretaris Camat Ukui ikut memberikan informasinya terkait pertanyaan yang sama, beliau diwawancarai pada tanggal yang sama 17 November 2020, dan berikut hasil wawancaranya :

“Kinerja Kelurahan Ukui Satu selama ini tidak ada masalah, mereka menjalankan tupoksi sesuai dengan aturan yang ada seperti menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam kinerja Kelurahan Ukui telah menjalakkannya dengan baik, sesuai topuksi dan standar operasional prosedur yang ada, namun hal tersebut belum dapat dinilai bahwa kelurahan ukui telah memiliki kinerja yang baik, karena masih banyak aspek yang

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Camat Ukui Pada Tanggal 17 November 2020.

menjadi indikator dalam menilai dan menentukan perkembangan desa/kelurahan. Sehingga analisis akan dilanjutkan kembali setelah menyelesaikan uraian hasil wawancara ini terkait indikator penilaian evaluasi bidang pemerintahan ini.

c. Desa dan Kelurahan Berbasis Teknologi Informasi E-Government

Dibawah ini akan dilanjutkan hasil wawancara dengan Lurah Ukui Satu mengenai : Apakah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Ukui Satu telah berbasis teknologi informasi E-Government ?

“Kelurahan Ukui Satu belum memiliki fasilitas teknologi informasi E-Government, sehingga pelayanan pengurusan terhadap masyarakat yang datang masih dilayani secara manual.”¹⁰⁵

Hal yang senada dismpakan oleh Sekretaris Camat Ukui ketika diwawancarai pada tanggal 17 November 2020, beliau menjelaskan :

“Memang salah satu penilaian terhadap perkembangan desa/kelurahan berorientasi pada fasilitas yang dimilikinya, seperti pemanfaatan teknologi informasi E-Government yang saat ini telah banyak di aplikasikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang telah berkembang cepat.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa belum tersedianya teknologi informasi E-Government di Kelurahan Ukui Satu, hal itu dijelaskan oleh Lurah dan Sekcam Ukui yang diwawancarai pada tanggal 17 November 2020. Keterangan tambahan didapatkan bahwa untuk menilai dan menetapkan perkembangan suatu desa/kelurahan memang dilihat dari fasilitas yang telah ada di desa/kelurahan tersebut. penggunaan E-Government memang

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Lurah Ukui Satu Pada Tanggal 17 November 2020.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Camat Ukui Pada Tanggal 17 November 2020.

merupakan suatu kemajuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, karena akan sangat efektif dan dan mempermudah bagi penyelenggaraan pemerintahan.

2. Evaluasi Bidang Kewilayahan

Evaluasi bidang kewilayahan merupakan indikator penilaian perkembangan desa dan kelurahan, didalam indikator ini terdapat 4 (empat) aspek penilaian meliputi identitas, batas, inovasi dan tanggap dan siaga bencana. Jadi dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan Lurah Ukui Satu dan Sekretaris Camat Ukui yang ditemui pada tanggal 17 November 2020. Pertanyaan pertama diajukan dari aspek penilaian batas, yang kemudian peneliti interprtasikan kedalam pertanyaan dibawah ini.

a. Identitas

Apakah Kelurahan Ukui telah menyusun data profil nya ?

“Kelurahan Ukui Satu masih belum menyusun data profil kelurahann, hal ini terkendala dari belum lengkapnya data dari seluruh aspek yang ada di Kelurahan Ukui Satu, insha’allah tahun depan akan diupayakan untuk profil Kelurahan Ukui Satu agar dapat dipublis.”¹⁰⁷

Lebih lanjut keterangan dari Lurah Ukui Satu akan dihubungkan dengan pendapat Sekretaris Camat Ukui yang diwawancarai pada tanggal yang sama, berikut pendapatnya :

“Kelurahan Ukui Satu memang belum mempublis data profil kelurahannya, sebab data yang dikumpulkan belum lengkap, kendalanya lainnya ada pada lurah orang yang mengumpulksn data meliputi seluru aspek yang ada di

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Lurah Ukui Satu Pada Tanggal 17 November 2020.

desa, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, fasilitas, potensi, dan lain sebagainya.”¹⁰⁸

Hasil wawancara diatas memberikan informasi bahwa Kelurahan Ukui Satu belum menyiapkan profil Kelurahanannya, sehingga penilaian mengenai aspek identitas ini dinilai belum baik, karena belum dilaksanakan, belum dituntaskan. profil desa sendiri merupakan suatu identitas bagi sebuah institusi pemerintahan, dimana didalamnya termuat berbagai macam informasi meliputi luas wilayah, keadaan wilayah, batas wilayah, keadaan ekonomi, keadaan masyarakat dan lain sebagainya. Hal yang paling penting dengan adanya profil ini adalah bagaimana sebuah informasi dikemas secara utuh untuk kemudian dapat di tampilkan/diakses oleh publik, dan dari sini lah potensi desa dapat digali untuk di kembangkan secara lebih lanjut.

b. Batas

Lanjut pada pertanyaan selanjutnya mengenai indikator aspek penilaian batas, sehingga pertanyaan yang menjadi instrumen dalam wawancara ini adalah :
Bagaimanakah keadaan dan batas-batas wilayah Kelurahan Ukui Satu saat ini ?

“Kelurahan Ukui Satu memiliki luas wilayah 18,95 Km², wilayahnya berbatasan dengan Desa Ukui Dua, Desa Try Mulya Jaya, dan Desa Bukit Mas.”¹⁰⁹

Lebih lanjut hasil perbincangan dengan Sekretaris Camat Ukui ketika diwawancarai pada tanggal 17 November 2020, informasi yang didapat terkait batas-batas wilayah Kelurahan Ukui Satu, berikut hasil wawancaranya :

¹⁰⁸ Loc. Cit. Sekretaris Camat Ukui

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan Lurah Ukui Satu Pada Tanggal 17 November 2020.

“Wilayah Kelurahan Ukui Satu berada di ketinggian 25 meter diatas permukaan laut, dengan batas sebelah barat adalah Desa Ukui Dua, sebelah timur berbatasan dengan Desa Try Mulya dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Mas.”¹¹⁰

Hasil wawancara diatas mengenai batas wilayah kelurahan ukui satu menjadi informasi yang peneliti dapatkan, informasi mengenai batas wilayah menjadi salah satu aspek penilaian evaluasi bidang kewilayahan. Batas wilayah suatu desa/kelurahan me jadi sangat penting, karena dalam menentukan besaran APBDDes atau anggaran sebuah kelurahan, salah satu yang mempengaruhinya adalah mengenai batas wilayah, yang artinya luasnya, bentuk geografinya, apakah merupakan daerah yang rawan terjadi bencana banjir atau lainnya. Jadi aspek tersebut sangat penting dan mempengaruhi besaran dana yang akan dialokasikan untuk APBDDes suatu desa, begitu juga dengan kelurahan.

c. Inovasi

Upaya terus dilakukan untuk mendapatkan seluruh informasi terkait aspek penilaian bidang evaluasi kewilayahan, dengan mengajukan pertanyaan berikutnya. Sehingga hasil wawancara selajutnya akan uraikan dibawah ini, pertanyaan yang diajukan mengenai : Apakah ada inovasi yang dilakukan pemerintahan Kelurahan Ukui Satu terkait kewilayahnya ?

“Kelurahan Ukui Satu belum memiliki inovasi untuk melihat potensi dalam pengembangan wilayahnya, sehingga hal ini membuat kelurahan ukui satu menjadi jalan ditempat.”¹¹¹

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Camat Ukui Pada Tanggal 17 November 2020.

¹¹¹ Loc. Cit. Lurah Ukui Satu Pada Tanggal 17 November 2020.

Senada dengan penjelasan diatas, Sekretaris Camat memberikan tanggapannya terkait pertanyaan yang diajukan mengenai : Apakah ada inovasi yang dilakukan pemerintahan Kelurahan Ukui Satu terkait kewilayahnya ?

“Belum ada inovasi yang dikembangkan di Kelurahan Ukui Satu, walaupun semestinya inovasi tersebut sangat dibutuhkan untuk peningkatan perkembangan desa/kelurahan.”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara mengenai aspek inovasi, dapat diketahui bahwa Kelurahan Ukui Satu hingga saat ini belum memiliki inovasi dalam mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya. Inovasi itu sendiri merupakan proses, pengembangan, pemanfaatan untuk menciptakan, memperbaiki suatu untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal kewilayahan inovasi bisa dilihat dari bagaimana seseorang dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya, misalnya suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata, pasar, dan lain sebagainya sesuai dengan potensi suatu wilayahnya. Sehingga dengan demikian hasil penelitian mengenai aspek inovasi ini belum baik karena memang belum adanya sebuah inovasi yang dimunculkan di kelurahan ukui satu.

d. Tanggap dan Siaga Bencana

Peneliti terus berupaya untuk mengumpulkan informasi yang diharapkan dapat di berikan oleh informan, untuk itu pertanyaan terkait aspek penilaian tanggap dan siaga bencana, yang diajukan kepada Lurah Ukui Satu ketika diwawancarai pada tanggal 17 November 2020, pertanyaan tersebut meliputi :

¹¹² Loc. Cit. Sekretaris Camat Ukui Pada Tanggal 17 November 2020.

Bagaimanakah tanggap dan kesiagaan pemerintahan Kelurahan Ukui dalam menghadapi potensi bencana di wilayahnya ?

“Alhamdulillah wilayah Kelurahan Ukui tidak memiliki potensi bencana alam, meskipun begitu potensi bencana akibat ulah manusia hampir setiap tahun terjadi di sini, seperti bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Ukui.”¹¹³

Lebih lanjut Sekretaris Camat Ukui menanggapi terkait pertanyaan yang sama ketika diwawancarai :

“Kelurahan Ukui Satu memang berada di wilayah yang aman, tidak ada potensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor dll. Namun jika dikaitkan dengan tanggap kesiagaan bencana, tentu hal ini telah ada komunikasi antar pejabat di instansi terkait, terutama wilayah yang rawan banjir dan kebakaran hutan seperti Desa Air Hitam dan Lubuk Kembang Bunga, perlu adanya koordinasi yang kuat untuk mengantisipasi adanya bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan.”¹¹⁴

Hail wawancara diatas memberikan informasi bahwa di Kelurahan Ukui Satu tidak dielaskan mengenai tanggap siaga terhadap potensi bencana alam, hal ini dikarenakan Kelurahan Ukui Satu berada diwilayah yang aman, bukan wilayah yang rawan akan adanya potensi bencana alam.

Berdasarkan hasil wawancara yang diajukan melalui 4 (empat) pertanyaan kepada Lurah dan Sekretaris Camat Ukui, dapat disimpulkan bahwa dari aspek identitas kelurahan ukui masih belum memiliki profil kelurahan, sehingga penilaiannya belum baik.

Untuk aspek batas, peneliti melihat lebih luas kepada keadaan wilayahnya, yakni batas-batas kelurahan ukui satu. Untuk batas wilayah kelurahan ukui satu telah diketahui, sehingga dapat dinilai telah baik. Selanjutnya mengenai aspek

¹¹³ Hasil wawancara Dengan Lurah Ukui satu pada Tanggal 17 November 2020.

¹¹⁴ Loc. Cit. sekretaris Camat Ukui

inovasi, kelurahan ukui satu belum memiliki inovasi dalam pengembangan wilayahnya, sehingga dinilai belum baik. Terakhir mengenai aspek tangga dan siaga terhadap potensi terjadinya bencana alam, pada aspek ini kelurahan ukui satu berada pada wilayah yang aman.

3. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan

a. Partisipasi

Evaluasi bidang kemasyarakatan merupakan indikator penilaian perkembangan desa dan kelurahan yang telah diatur didalam Peremdagri No. 81 tahun 2015 Tentang Evakuasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, didalam indikator ini terdapat 4 (empat) aspek penilaian meliputi partisipasi masyarakat, keamanan dan ketertibab, pendidikan dan kesehatan. Jadi dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan Lurah Ukui Satu dan Sekretaris Camat Ukui yang ditemui pada tanggal 17 November 2020. Pertanyaan pertama diajukan dari aspek penilaian identitas, yang kemudian peneliti interprtasikan kedalam pertanyaan dibawah ini.

Bagaimanakah partisipasi masyarakat di Kelurahan Ukui Satu ?

“Kelurahan Ukui Satu masyarakatnya sedikit kurang peduli untuk ikut serta melibatkan diri pada kegiatan yang diadakan, namun bukan berarti mereka apatis, maksudnya warga disini yang hanya ikut berpartisipasi hanya warga yang memiliki jabatan saja, sementara warga yang tidak memiliki jabatan hanya menjadi penonton.”¹¹⁵

Informasi yang didapatkan dari Lurah Ukui Satu akan dibandingkan dengan jawaban dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Ukui, yaitu :

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Lurah Ukui Satu pada tanggal 17 November 2020.

“Partisipasi masyarakat di Ukui Satu sedikit kurang baik dibandingkan dengan masyarakat yang berada di desa trans, kemungkinan hal ini disebabkan budaya yang telah terbangun selama ini, dimana kelurahan ukui satu merupakan wilayah yang dihuni oleh orang tempatan, suku asli melayu riau. Meskipun begitu rasa persaudaraan antara mereka begitu kuat, hanya saja dalam partisipasi hanya orang yang memiliki jabatan saja yang selalu ikut dalam kegiatan yang diadakan kelurahan.”¹¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk aspek partisipasi di Kelurahan Ukui Satu masyarakat nya kurang memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam kegiatan yang diadakan kelurahan, kegiatan kegotongroyongan juga tidak begitu baik. Masyarakat Kelurahan Ukui Satu merupakan masyarakat tempatan yang dihuni mayoritas suku melayu dan jawa. Sehingga berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi, Kelurahan Ukui Satu masih belum cukup baik, sehingga harus lebih ditingkatkan lagi dengan membangun kesadaran antar warga.

b. Keamanan dan Ketertiban

Wawancara dilanjutkan untuk mengumpulkan informasi terkait aspek penilaian yang ada didalam evaluasi bidang kemasyarakatan. Pertanyaan kali ini terkait aspek keamanan dan ketertiban, pertanyaan yang diajukan yaitu :

Bagaimanakah situasi keamanan dan ketertiban di Kelurahan Ukui Satu ?

“Keamanan di Kelurahan Ukui Satu diciptakan dengan melakukan upaya koordinasi dan komunikasi antar stakholder, saya sebagai lurah biasanya menyampaikan langsung kepada ketua RT/RW se Kelurahan Ukui satu untuk selalu menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing menyampaikan ke jajaran RT/RW dan warganya untuk waspada terhadap tindak kriminalitas.”¹¹⁷

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Camat Ukui pada tanggal 17 November 2020.

¹¹⁷ Loc. Cit. Lurah Ukui Satu

Lebih jauh informasi selanjutnya didapatkan dari Sekretaris camat Ukui, ketika diwawancarai beliau menjelaskan terkait keamanan dan ketertiban yang ada di Kelurahan Ukui Satu bahwa :

“Menciptakan keamanan merupakan tanggungjawab bersama, untuk itu para stakeholder mulai dari Unsur pemerintahan desa, camat, bhabinkamtibmas, bhabinsa selalu berkoordinasi apabila ada gejala atau potensi yang dapat menimbulkan konflik terutama antar warga desa. Dalam konteks lain seperti pencegahan dan meminimalisir kriminalitas di desa kecamatan ukui dilakukan upaya pengaktifan kembali poskamling, karena untuk bangunan poskamling itu sendiri di masing-masing desa memang telah tersedia.”¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa setiap desa dan kelurahan telah memiliki koordinasi yang baik antar stakholder. Hal ini didukung dengan prasarana yang seperti pos penjagaan/pos ronda yang telah dimiliki disetiap sudut desa dan juga kordinasi serta komunikasi antara sesama warga desa dan juga jajaran stakholder yang ada di wilayah tersebut sehingga keamanan dan rasa aman tentu dapat dirasakan warga desa. Hal ini juga tidak terlepas dari peran aktifnya babinkhabtimas dan babinsa bersama dengan warga desa membangun komunikasi yang baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait aspek keamanan dan ketertiban telah terlaksana dengan baik.

c. Pendidikan

Wawancara dilanjutkan untuk mengumpulkan informasi terkait aspek penilaian yang ada didalam evaluasi bidang kemasyarakatan. Pertanyaan kali ini terkait aspek pendidikan, pertanyaan yang diajukan yaitu :

Bagaimanakah ketersediaan fasilitas pendidikan di Kelurahan Ukui Satu ?

¹¹⁸ Loc. Cit. Sekretaris Camat Ukui

“Kelurahan Ukui Satu hanya terdapat 4 (empat) fasilitas pendidikan, terdiri dari 1 (satu) TK dan 2 Sekolah Dasar (SD), dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Akses menuju fasilitas pendidikan tersebut dua diantaranya telah jalannya telah diaspal, sedangkan selebihnya masih berupa tanah keras dan batu kerikil.”¹¹⁹

Wawancara dilanjutkan dengan Sekretaris Ukui dengan mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas pendidikan di Kelurahan Ukui Satu ?

“Kelurahan Ukui Satu hanya terdapat 5 (empat) fasilitas pendidikan, terdiri dari 1 (satu) TK dan 3 Sekolah Dasar (SD), dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Akses menuju fasilitas pendidikan tersebut dua diantaranya telah jalannya telah diaspal, sedangkan selebihnya masih berupa tanah keras dan batu kerikil.”¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara terkait pendidikan, diketahui bahwa di Kelurahan Ukui Satu, telah tersedia 5 (lima) fasilitas pendidikan terdiri dari 1 (satu) TK dan 3 Sekolah Dasar (SD), dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP), akses menuju fasilitas pendidikan tersebut dua diantaranya telah jalannya telah diaspal, sedangkan selebihnya masih berupa tanah keras dan batu kerikil. Sehingga dengan keadaan serta kondisi fasilitas pendidikan yang telah ada di Kelurahan Ukui dapat disimpulkan bahwa aspen pendidikan telah baik di Kelurahan Ukui Satu.

d. Kesehatan

Wawancara dilanjutkan untuk mengumpulkan informasi terkait aspek penilaian yang ada didalam evaluasi bidang kemasyarakatan. Pertanyaan kali ini

¹¹⁹ Loc. Cit. Lurah Ukui Satu pada Tanggal 17 November 2020.

¹²⁰ Op. Cit. Sekretaris Camat Ukui Pada Tanggal 17 November 2020.

terkait aspek kesehatan, pertanyaan yang diajukan yaitu : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas kesehatan di Kelurahan Ukui Satu ?

“Di Kelurahan Ukui Satu terdapat 3 (tiga) praktek dokter, satu puskesmas dan tiga posyandu. Fasilitas kesehatan tersebut pada dasarnya terletak di tengah pemukiman warga kelurahan ukui satu tersebar tidak jauh dari pemukiman warga, dan menurut saya dengan adanya fasilitas praktek dokter yang tersebar ini tentu menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi warga khususnya warga yang terdekat dari praktek dokter tersebut. Jadi menurut saya mengenai jarak tempuh itu ya relatif tergantung posisi rumah warga, jika di ambil rata-rata jarak tempuhnya 1-8 Km.”¹²¹

Lebih lanjut tambahan informasi terkait aspek kesehatan yang merupakan penilaian terakhir dari evaluasi bidang kemasyarakatan, untuk itu kembali diwawancarai Sekretaris Camat pada tanggal 17 November 2020, beliau menjelaskan bahwa :

“Keberadaan fasilitas kesehatan seperti poskesdes, polindes dan posyandu tidak semua fasilitas tersebut tersedia di desa, hanya beberapa desa saja yang memiliki ke tiga fasilitas tersebut, hanya posyandu yang telah dimiliki di masing-masing desa. Poskesdes, Polindes dan posyandu pada umumnya berada tidak jauh dari ibukota desa, sehingga untuk jaraknya sendiri bervariasi, namun untuk sebagian warga jarak fasilitas kesehatan tersebut cukup dekat berkisar 0-8 Km. Desa yang berada di Kecamatan Ukui sendiri sebagian besar telah tersedia fasilitas kesehatan seperti praktek bidan yang membuka izin praktek, untuk praktek dokter hanya berada di ibukota Kecamatan Ukui.”¹²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Kelurahan Ukui Satu telah tersedia 3 (tiga) praktek dokter, satu puskesmas dan tiga posyandu. Maka dapat disimpulkan bahwa bahwa aspek kesehatan pada Kelurahan Ukui Satu telah baik, hal ini dikarenakan telah tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai di Kelurahan Ukui Satu.

¹²¹ Loc. Cit. Lurah Ukui

¹²² Loc. Cit. Sekretaris Ukui

C. 2. Desa Ukui Dua

1. Evaluasi Bidang Pemerintahan

a. Pemerintahan

Evaluasi bidang pemerintahan merupakan salah satu indikator penilaian terhadap perkembangan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Ukui, untuk itu dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara terkait indikator yang kemudian akan dihubungkan dengan data sekunder untuk selanjutnya dianalisis.

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 18 November 2020, peneliti menemui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Hasil wawancara akan diuraikan dibawah ini.

Bagaimanakah status Desa Ukui Dua pada saat ini ?

“Desa Ukui Dua adalah Desa tempatan yang dekat wilayahnya tidak terlalu jauh dengan Kecamatan Ukui, saat ini Desa Ukui Dua telah menjadi Desa yang berkembang, setelah 3 tahun terakhir desa ukui dua masih dinilai sebagai desa kurang berkembang.”¹²³

Lebih lanjut pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Sekretaris Camat Ukui, ketika diwawancarai pada tanggal 17 November 2020, berikut hasil wawancaranya :

“Desa Ukui Dua tadinya adalah Desa yang dinilai sebagai Desa kurang berkembang, itu terjadi pada 3 tahun belakangan ini, sehingga dengan upaya yang sungguh-sungguh pada akhir tahun 2019 yang lalu telah naik statusnya menjadi Desa berkembang. Pencapaian ini tidak terlepas dari pengolaan dana desa yang lebih terarah dan dapat dimaksimalkan, karena Desa Ukui Dua sendiri memiliki potensi sumber minyak bumi di wilayahnya, sehingga mendapatkan dana bagi hasil dalam pengelolaannya.”¹²⁴

¹²³ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Ukui Dua Pada Tanggal 18 November 2020

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tanggal 18 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir Desa Ukui Dua dinilai masih sebagai desa yang kurang berkembang, hal ini disebabkan beberapa faktor dalam hal pengelolaan dana desa yang tidak maksimal dan tepat sasaran. Desa Ukui Dua memiliki dana Desa setiap tahunnya mencapai 2 (dua) Milyar lebih, karena wilayahnya yang memiliki potensi sumber minyak bumi yang saat ini dikelola oleh PT. Pertamina Lirik, sehingga dalam keuntungannya Desa Ukui Dua mendapatkan bagi hasil. Sub indikator pemerintahan sebagai salah satu aspek di dalam penilaian perkembangan desa dan kelurahan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Ukui dapat dikatakan sebagai desa berkembang dinilai dari aspek pemerintahannya. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

b. Kinerja

Selanjutnya mengenai pertanyaan kedua yang diajukan kepada Kepala Desa Ukui Dua, pertanyaan yang diajukan mengenai : Bagaimanakah kinerja pemerintahan Kelurahan Ukui Satu jika dilihat dari beberapa tahun belakangan ini?

“Kinerja Desa Ukui Dua sudah mulai membaik, hal ini dapat dilihat dari penyelesaian laporan keuangan dan pengesahan APBDes yang mulai tepat waktu. Sebelumnya beberapa tahun belakangan ini, desa ukui dua masih sering terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan

pengesahan APBDes. Untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.”¹²⁵

Lebih lanjut di waktu yang berbeda Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), ikut memberikan informasinya terkait pertanyaan yang sama, beliau diwawancarai pada tanggal yang sama 17 November 2020, dan berikut hasil wawancaranya :

“Desa Ukui Dua beberapa tahun belakangan kinerjanya masih belum baik, masih terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun pada tahun 2019 Desa Ukui Dua telah lebih baik, karena laporan pertanggungjawaban diselesaikan dengan tepat waktu.”¹²⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa beberapa tahun belakangan Desa Ukui Dua dinilai masih sebagai desa yang kurang berkembang, Hal ini disebabkan beberapa faktor dalam hal masih terlambatnya dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun pada tahun 2019 Desa Ukui Dua telah lebih baik, karena laporan pertanggungjawaban diselesaikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Ukui Dua dapat dikatakan sebagai desa berkembang dinilai dari aspek kinerjanya. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

¹²⁵ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Ukui Dua Pada Tanggal 18 November 2020.

¹²⁶ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tanggal 18 November 2020.

c. Desa dan Kelurahan Berbasis Teknologi Informasi E-Government

Dibawah ini akan dilanjutkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ukui Dua mengenai : Apakah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Ukui Satu telah berbasis teknologi informasi E-Government ?

“Desa Ukui Dua belum memiliki fasilitas teknologi informasi E-Government, sehingga pelayanan pengurusan terhadap masyarakat yang datang masih dilayani secara manual.”¹²⁷

Hal yang senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), ketika diwawancarai pada tanggal 18 November 2020, beliau menjelaskan :

“Memang salah satu penilaian terhadap perkembangan desa/kelurahan berorientasi pada fasilitas yang dimilikinya, seperti pemanfaatan teknologi informasi E-Government yang saat ini telah banyak di aplikasikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang telah berkembang cepat.”¹²⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa belum tersedianya teknologi informasi E-Government di Desa Ukui Dua, hal itu dijelaskan oleh Kepala Desa Ukui Dua dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (PMD) yang diwawancarai pada tanggal 18 November 2020. Keterangan tambahan didapatkan bahwa untuk menilai dan menetapkan perkembangan suatu desa/kelurahan memang dilihat dari fasilitas yang telah ada di desa/kelurahan tersebut. penggunaan E-Government memang merupakan suatu kemajuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, karena akan sangat efektif dan dan mempermudah bagi penyelenggaraan pemerintahan.

¹²⁷ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Ukui Dua Pada Tanggal 18 November 2020.

¹²⁸ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tanggal 17 November 2020.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Ukui Dua dapat dikatakan sebagai desa kurang berkembang dinilai dari aspek pemanfaatan teknologi informasi E-Government yang belum tersedia. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

2. Evaluasi Bidang Kewilayahan

a. Identitas

Evaluasi bidang kewilayahan merupakan indikator penilaian perkembangan desa dan kelurahan, didalam indikator ini terdapat 4 (empat) aspek penilaian meliputi identitas, batas, inovasi dan tanggap dan siaga bencana. Jadi dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ukui Dua dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD yang ditemui pada tanggal 18 November 2020. Pertanyaan pertama diajukan dari aspek penilaian identitas, yang kemudian peneliti interpretasikan kedalam pertanyaan dibawah ini.

Apakah Kelurahan Ukui telah menyusun data profil nya ?

“Desa Ukui Dua masih belum menyusun data profil Desanya, hal ini terkendala dari belum lengkapnya data dari seluruh aspek yang ada di Desa Ukui Dua, insha'allah tahun depan akan diupayakan untuk profil Desa Ukui Dua agar dapat dipublis.”¹²⁹

Lebih lanjut keterangan dari Kepala Desa Ukui Dua akan dihubungkan dengan pendapat Kepala Dinas Perberdayaan masyarakat desa (PMD) yang diwawancarai pada tanggal yang sama, berikut pendapatnya :

¹²⁹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Ukui Dua Pada Tanggal 18 November 2020.

“Desa Ukui Dua memang belum mempublis data profil Desanya, sebab data yang dikumpulkan belum lengkap, kendalanya lainnya ada pada orang yang mengumpulksn data yang belum ada, sehingga data dari seluru aspek yang ada di desa belum dapat terdata seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, fasilitas, potensi, dan lain sebagainya.”¹³⁰

Hasil wawancara diatas memberikan informasi bahwa Desa Ukui Dua belum menyiapkan profil desanya, sehinga penilaian mengenai aspek identitas ini dinilai belum baik, karena belum dilaksanakan, belum dituntaskan. profil desa sendiri merupakan suatu identitas bagi sebuah institusi pemerintahan, dimana didalamnya termuat berbagai macam informasi meliputi luas wilayah, keadaan wilayah, batas wilayah, keadaan ekonomi, keadaan masyarakat dan lain sebagainya. Hal yang paling penting dengan adanya profil ini adalah bagaimana sebuah informasi dikemas secara utuh untuk kemudian dapat di tampilkan/diakses oleh publik, dan dari sini lah potensi desa dapat digali untuk di kembangkan secara lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Ukui Dua dapat dikatakan sebagai desa kurang berkembang dinilai dari aspek identitas yang belum tersedia seperti profil desanya. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

¹³⁰ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa pada Tanggal 18 November 2020.

b. Batas

Lanjut pada pertanyaan selanjutnya mengenai aspek batas, sehingga pertanyaan yang menjadi instrumen dalam wawancara ini adalah : Bagaimanakah keadaan dan batas wilayah Desa Ukui Dua saat ini ?

“Desa Ukui Dua memiliki luas wilayah 257,04 Km², wilayahnya berbatasan dengan Kelurahan Ukui Satu, Desa Kampung Baru, Desa Bukit Mas dan Taman Nasional Teso Nili (TNTN).”¹³¹

Lebih lanjut hasil wawancara diatas akan dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada tanggal 18 November 2020, informasi yang didapat terkait batas-batas wilayah Kelurahan Ukui Satu, berikut hasil wawancaranya :

“Wilayah Desa Ukui Dua sebagian besar merupakan wilayah Taman Nasional Teso Nilo, lebih dari separuhnya adalah kawasan taman nasional, batas wilayahnya sebelah timur Kelurahan Ukui Satu, sebelah barat Desa Kampung Baru, sebelah Utara Desa Bukit Maas. Saat ini di Desa Ukui Dua masih sering terjadi konflik lahan perkebunan antar masyarakat dan perusahaan ataupun antara sesama masyarakat”¹³²

Hasil wawancara diatas mengenai batas wilayah Ukui Dua menjadi informasi yang peneliti dapatkan, informasi mengenai batas wilayah menjadi salah satu aspek penilaian evaluasi bidang kewilayahan. Batas wilayah suatu desa/kelurahan menjadi sangat penting, karena dalam menentukan besaran APBDes atau anggaran sebuah kelurahan, salah satu yang mempengaruhinya adalah mengenai batas wilayah, yang artinya luasnya, bentuk geografinya, apakah merupakan daerah yang rawan terjadi bencana banjir atau lainnya. Jadi aspek

¹³¹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Ukui Dua Pada Tanggal 18 November 2020.

¹³² Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tanggal 18 November 2020.

tersebut sangat penting dan mempengaruhi besaran dana yang akan dialokasikan untuk APBDes suatu desa, begitu juga dengan kelurahan.

Wilayah Ukui Dua masih sering terjadi konflik lahan perkebunan antara masyarakat dan perusahaan dan juga antara masyarakat itu sendiri, dimana lahan yang digarap masyarakat di klam oleh perusahaan sebagai areal perkebunan perusahaan, begitu juga antara sesama masyarakat membeli dan mengerjakan lahan sengketa.

c. Inovasi

Upaya terus dilakukan untuk mendapatkan seluruh informasi terkait aspek inovasi yang menjadi bagian penilaian indikator evaluasi bidang kewilayahan, dengan mengajukan pertanyaan berikutnya. Apakah ada inovasi yang dilakukan pemerintahan Desa Ukui Dua terkait kewilayahnya ?

“Desa Ukui Dua merupakan wilayah yang terdapat sumur-sumur minyak, sehingga hal tersebut menjadi potensi terbesar yang dimiliki oleh Desa, saat ini Desa Ukui Dua mendapatkan dana bagi hasil oleh PT. Pertamina lirik dari sumber minyak yang dikelolanya.”¹³³

Senada dengan penjelasan diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan tanggapannya terkait pertanyaan yang diajukan mengenai : Apakah ada inovasi yang dilakukan pemerintahan Kelurahan Ukui Satu terkait kewilayahnya ?

“Belum ada inovasi yang dikembangkan di Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, walaupun semestinya inovasi tersebut sangat dibutuhkan untuk peningkatan perkembangan desa/kelurahan.”¹³⁴

¹³³ Loc. Cit. Lurah Ukui Satu Pada Tanggal 17 November 2020.

¹³⁴ Loc. Cit. Sekretaris Camat Ukui Pada Tanggal 17 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai aspek inovasi, dapat diketahui bahwa Desa Ukui Dua Satu hingga saat ini belum memiliki inovasi dalam mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya. Inovasi itu sendiri merupakan proses, pengembangan, pemanfaatan untuk menciptakan, memperbaiki suatu untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal kewilayahan inovasi bisa dilihat dari bagaimana suatu wilayah dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya, misalnya suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata, pasar, dan lain sebagainya sesuai dengan potensi suatu wilayahnya.

Apalagi dengan potensi minyak bumi yang saat ini telah memberikan pemasukan yang besar terhadap APBDDes Desa, seharusnya dengan dana yang cukup besar tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan suatu potensi di Desa Ukui Dua demi kesejahteraan dan kemajuan daerahnya. Sehingga dengan demikian hasil penelitian mengenai aspek inovasi ini belum baik karena memang belum adanya sebuah inovasi yang dimunculkan di kelurahan ukui satu.

d. Tanggap dan Siaga Bencana

Peneliti terus berupaya untuk mengumpulkan informasi yang diharapkan dapat di berikan oleh informan, untuk itu pertanyaan terkait aspek penilaian tanggap dan siaga bencana, yang diajukan kepada Kepala Desa Ukui Dua ketika diwawancarai pada tanggal 18 November 2020, pertanyaa tersebut meliputi :

Bagaimanakah tanggap dan kesiagaan pemerintahan Desa Ukui Dua dalam menghadapi potensi bencana di wilayahnya ?

“Potensi terbesar bencana di wilayah Desa Ukui Dua adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, hampir setiap tahun terjadi di sini. Dalah hal

penangannya Kepala Desa bersama stakholder terkait selalu berkoordinasi dan terjun langsung kelapangan bilamana mendapati informasi adanya titik api diwilayah titik api tersebut. Hal lainnya biasanya dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat luas akan bahayanya membuka hutan dan lahan dengan cara membakar.”¹³⁵

Lebih lanjut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menanggapi terkait pertanyaan yang sama ketika diwawancarai :

“Desa Ukui Dua sebagian besar wilayahnya adalah areal perkebunan dan kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN). Potensi terbesar bencana di wilayah Desa Ukui Dua adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, hampir setiap tahun terjadi di sini. Dalah hal penangannya Kepala Desa bersama stakholder terkait selalu berkoordinasi dan terjun langsung kelapangan bilamana terdapat pantauan hot spot. Upaya lainnya dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat luas akan bahayanya membuka hutan dan lahan dengan cara membakar bahkan ada sanksi hukumnya.”¹³⁶

Hasil wawancara diatas memberikan informasi bahwa Desa Ukui Dua sebagian besar wilayahnya adalah areal perkebunan dan kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN). Potensi terbesar bencana di wilayah Desa Ukui Dua adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, hampir setiap tahun terjadi di sini. Dalah hal penangannya Kepala Desa bersama stakholder terkait selalu berkoordinasi dan terjun langsung kelapangan bilamana terdapat titik api. Upaya lainnya dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat luas akan bahayanya membuka hutan dan lahan dengan cara membakar bahkan ada sanksi hukumnya

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Ukui Dua dapat dikatakan sebagai desa berkembang dinilai dari aspek siaga dan tanggap bencana yang telah baik dalam penangan di wilayah desanya. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari

¹³⁵ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Ukui Dua Pada Tanggal 17 November 2020.

¹³⁶ Loc. Cit. sekretaris Camat Ukui

indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

3. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan

e. Partisipasi

Evaluasi bidang kemasyarakatan merupakan indikator penilaian perkembangan desa dan kelurahan yang telah diatur didalam Peremdagri No. 81 tahun 2015 Tentang Evakuasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, didalam indikator ini terdapat 4 (empat) aspek penilaian meliputi partisipasi masyarakat, keamanan dan ketertibab, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ukui Dua dan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa yang ditemui pada tanggal 18 November 2020. Pertanyaan pertama diajukan dari aspek penilaian identitas, yang kemudian peneliti interprtasikan kedalam pertanyaan dibawah ini.

Bagaimanakah partisipasi masyarakat di Kelurahan Ukui Satu ?

“Desa Ukui Dua masyarakatnya sedikit kurang peduli untuk ikut serta melibatkan diri pada kegiatan yang diadakan, namun bukan berarti mereka apatis, maksudnya warga disini yang hanya ikut berpartisipasi hanya warga yang memiliki jabatan saja, sementara warga yang tidak memiliki jabatan hanya menjadi penonton.”¹³⁷

Informasi yang didapatkan dari Kepala Desa Ukui Dua akan dibandingkan dengan jawaban dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu :

“Partisipasi masyarakat di Desa Ukui Dua sedikit kurang baik dibandingkan dengan masyarakat yang berada di desa trans, kemungkinan hal ini

¹³⁷ Hasil Wawancara Dengan Lurah Ukui Satu pada tanggal 17 November 2020.

disebabkan budaya yang telah terbangun selama ini, dimana kelurahan ukui satu merupakan wilayah yang dihuni oleh orang tempatan, suku asli melayu riau. Meskipun begitu rasa persaudaraan antara mereka begitu kuat, hanya saja dalam partisipasi hanya orang yang memiliki jabatan saja yang selalu ikut dalam kegiatan yang diadakan kelurahan.”¹³⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk aspek partisipasi di Desa Ukui Dua masyarakat nya kurang memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam kegiatan yang diadakan kelurahan, kegiatan kegotongroyongan juga tidak begitu baik. Masyarakat Kepala Desa Ukui dua merupakan masyarakat tempatan yang dihuni mayoritas suku melayu dan jawa. Sehingga berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi, Kelurahan Ukui Satu dinilai masih kurang berkembang, sehingga harus lebih ditingkatkan lagi dengan membangun kesadaran antar warga.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Ukui Dua dapat dikatakan sebagai desa “kurang berkembang” dinilai dari aspek partisipasi masyarakat yang kurang sadar untuk berpartisipasi. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

f. Keamanan dan Ketertiban

Wawancara dilanjutkan untuk mengumpulkan informasi terkait aspek penilaian yang ada didalam evaluasi bidang kemasyarakatan. Pertanyaan kali ini terkait aspek keamanan dan ketertiban, pertanyaan yang diajukan yaitu :

¹³⁸ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Camat Ukui pada tanggal 17 November 2020.

Bagaimanakah menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Ukui Dua ?

“Keamanan di Desa Ukui Dua diciptakan dengan melakukan upaya koordinasi dan komunikasi antar stakholder, saya sebagai lurah biasanya menyampaikan langsung kepada ketua RT/RW Desa Ukui dua satu untuk selalu menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing menyampaikan ke jajaran RT/RW dan warganya untuk waspada terhadap tindak kriminalitas.”¹³⁹

Lebih jauh informasi selanjutnya didapatkan dari Kepala Dinas, ketika diwawancarai beliau menjelaskan terkait keamanan dan ketertiban yang ada di Desa Ukui Dua bahwa :

“Menciptakan keamanan merupakan tanggungjawab bersama, untuk itu para stakeholder mulai dari Unsur pemerintahan desa, camat, bhabinkamtibmas, bhabinsa selalu berkoordinasi apabila ada gejala atau potensi yang dapat menimbulkan konflik terutama antar warga desa. Dalam konteks lain seperti pencegahan dan meminimalisir kriminalitas di desa kecamatan ukui dilakukan upaya pengaktifan kembali poskamling, karena untuk bangunan poskamling itu sendiri di masing-masing desa memang telah tersedia.”¹⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa setiap desa dan kelurahan telah memiliki koordinasi yang baik antar stakholder. Hal ini didukung dengan prasarana yang seperti pos penjagaan/pos ronda yang telah dimiliki disetiap sudut desa dan juga kordinasi serta komunikasi antara sesama warga desa dan juga jajaran stakholder yang ada di wilayah tersebut sehingga keamanan dan rasa aman tentu dapat dirasakan warga desa. Hal ini juga tidak terlepas dari peran aktifnya babinkhabtimas dan babinsa bersama dengan warga desa membangun komunikasi yang baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait aspek keamanan dan ketertiban telah terlaksana dengan baik.

¹³⁹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Ukui Dua Pada Tanggal 18 November 2020.

¹⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Pada tanggal 18 November 2020.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Ukui Dua dapat dikatakan sebagai desa ‘berkembang’ dinilai dari aspek “menjaga keamanan dan ketertiban” yang telah baik di wilayah desanya. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

g. Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu penilaian didalam evaluasi bidang kemasyarakatan untuk melihat tingkat perkembangan desa dan kelurahan, untuk itu dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ukui Dua pada tanggal 18 November 2020, pertanyaan yang diajukan adalah :
Bagaimanakah ketersediaan fasilitas pendidikan di Desa Ukui Dua ?

“Desa Ukui Dua memiliki 2 (dua) Taman Kanak-Kanak (TK), 1 (satu) Sekolah Dasar dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP). Akses menuju fasilitas pendidikan tersebut merupakan jalan yang sudah beraspal dan setengahnya lagi kerikil dengan tanah yang keras.”¹⁴¹

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa pada tanggal 18 November menjelaskan bahwa :

“Akses menuju ke fasilitas pendidikan baik tingkat SD dan SMP sebagian besar jalannya kerikil dan tanah keras, hanya beberapa desa saja yang jalan utama menuju ke desa dan sekolahnya yang sebagian sudah beraspal, akses jalan beraspal berada di Desa Ukui Dua. Jarak tempuh terdekat sampai dengan terjauh antara 0-9 Km.”¹⁴²

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Ukui Dua pada tanggal 18 November 2020.

¹⁴² Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tanggal 18 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait pertanyaan aspek pendidikan, diketahui bahwa Desa Ukui Dua memiliki 2 (dua) Taman Kanak-Kanak (TK), 1 (satu) Sekolah Dasar dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk akses jalannya sendiri masih sebagian telah diaspal dan sebagian lagi belum. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Desa Ukui Dua berkembang dalam hal fasilitas pendidikannya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Ukui Dua dapat dikatakan sebagai desa berkembang dinilai dari aspek “pendidikan” di wilayah desanya. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

h. Kesehatan

Wawancara dilanjutkan untuk mengumpulkan informasi terkait aspek penilaian yang ada didalam evaluasi bidang kemasyarakatan. Pertanyaan kali ini terkait aspek kesehatan, pertanyaan yang diajukan yaitu : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas kesehatan di Desa Ukui Dua ?

“Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Desa Ukui Dua pada tanggal 18 November 2020.

“Desa Ukui Dua memiliki 1 (satu) Poliklinik, 1 (satu) Polindes, keberadaannya tersebar di beberapa tempat di tengah Desa Ukui Dua, jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah penduduk tidak lebih dari 10 Km, namun keberadaan fasilitas kesehatan tersebut tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga desa ukui dua, hal ini dikarenakan mayoritas warga

yang lebih percaya dan memilih menggunakan jasa pengobatan kampung.”¹⁴³

Lebih lanjut tambahan informasi terkait aspek kesehatan yang merupakan penilaian terakhir dari evaluasi bidang kemasyarakatan, untuk itu akan diwawancarai Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa pada tanggal 18 November 2020, beliau menjelaskan bahwa :

“Keberadaan fasilitas kesehatan seperti poskesdes, polindes dan posyandu tidak semua fasilitas tersebut tersedia di desa, hanya beberapa desa saja yang memiliki ke tiga fasilitas tersebut, hanya posyandu yang telah dimiliki di masing-masing desa. Poskesdes, Polindes dan posyandu pada umumnya berada tidak jauh dari ibukota desa, sehingga untuk jaraknya sendiri bervariasi, namun untuk sebagian warga jarak fasilitas kesehatan tersebut cukup dekat berkisar 0-10 Km. Desa yang berada di Kecamatan Ukui sendiri sebagaimana besar telah tersedia fasilitas kesehatan seperti praktek bidan yang membuka izin praktek, untuk praktek dokter hanya berada di ibukota Kecamatan Ukui.”¹⁴⁴

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa. Desa Ukui Dua memiliki 1 (satu) Poliklinik, 1 (satu) Polindes, namun ada kebiasaan yang terbawa hingga saat ini, yang mana mayoritas warga desa ukui dua lebih percaya dan memilih pengobatan kampung, sehingga yang terjadi fasilitas kesehatan yang ada tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari aspek kesehatan, desa ukui dua telah baik karena memiliki fasilitas kesehatan di desanya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Ukui Dua dapat dikatakan sebagai desa “kurang berkembang” dinilai dari aspek kesehatan yang mana masyarakatnya masih kuat dalam mempercayai pengobatan kampung, sehingga fasilitas kesehatan yang tersedia menjadi tidak

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Ukui Dua Pada Tanggal 18 November 2020.

¹⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tanggal 18 November 2020.

dimasfaatkan oleh masyarakat Desa Ukui Dua. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

C. 3. Desa Lubuk Kembang Bunga

1. Evaluasi Bidang Pemerintahan

a. Pemerintahan

Evaluasi bidang pemerintahan merupakan salah satu indikator penilaian terhadap perkembangan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Ukui, untuk itu dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara terkait indikator yang kemudian akan dihubungkan dengan data sekunder untuk selanjutnya dianalisis.

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 20 November 2020, peneliti menemui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Hasil wawancara akan diuraikan dibawah ini.

Bagaimanakah status Desa Lubuk Kembang Bunga pada saat ini ?

“Desa Lubuk Kembang Bunga adalah Desa tempatan yang dekat wilayahnya tidak terlalu jauh dengan Kecamatan Ukui, saat ini Desa Lubuk Kembang Bunga telah menjadi Desa yang berkembang, setelah 3 tahun terakhir desa Lubuk Kembang Bunga masih dinilai sebagai desa kurang berkembang.”¹⁴⁵

Lebih lanjut pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Sekretaris Camat Ukui, ketika diwawancarai pada tanggal 20 November 2020, berikut hasil wawancaranya :

¹⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga Pada Tanggal 20 November 2020

“Desa Lubuk Kembang Bunga tadinya adalah Desa yang dinilai sebagai Desa kurang berkembang, itu terjadi pada 3 tahun belakangan ini, sehingga dengan upaya yang sungguh-sungguh pada akhir tahun 2019 yang lalu telah naik statusnya menjadi Desa berkembang. Pencapaian ini tidak terlepas dari pengolaan dana desa yang lebih terarah dan dapat dimaksimalkan, karena Desa Lubuk Kembang Bunga sendiri memiliki potensi sumber minyak bumi di wilayahnya, sehingga mendapatkan dana bagi hasil dalam pengelolaannya.”¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir Desa Lubuk Kembang Bunga dinilai masih sebagai desa yang kurang berkembang, hal ini disebabkan beberapa faktor dalam hal pengelolaan dana desa yang tidak maksimal dan tepat sasaran. Desa Lubuk Kembang Bunga memiliki dana Desa setiap tahunnya mencapai 2 (dua) Milyar lebih, karena wilayahnya yang memiliki potensi sumber minyak bumi yang saat ini dikelola oleh PT. Pertamina Lirik, sehingga dalam keuntungannya Desa Lubuk Kembang Bunga mendapatkan bagi hasil. Sub indikator pemerintahan sebagai salah satu aspek di dalam penilaian perkembangan desa dan kelurahan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Ukui dapat dikatakan sebagai desa berkembang dinilai dari aspek pemerintahannya. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tanggal 20 November 2020.

b. Kinerja

Selanjutnya mengenai pertanyaan kedua yang diajukan kepada Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga, pertanyaan yang diajukan mengenai : Bagaimanakah kinerja pemerintahan Desa Lubuk Kembang Bunga jika dilihat dari beberapa tahun belakangan ini?

“Kinerja Desa Lubuk Kembang Bunga sudah mulai membaik, hal ini dapat dilihat dari penyelesaian laporan keuangan dan pengesahan APBDes yang mulai tepat waktu. Sebelumnya beberapa tahun belakangan ini, desa Lubuk Kembang Bunga masih sering terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pengesahan APBDes. Untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.”¹⁴⁷

Lebih lanjut di waktu yang berbeda Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), ikut memberikan informasinya terkait pertanyaan yang sama, beliau diwawancarai pada tanggal yang sama 20 November 2020, dan berikut hasil wawancaranya :

“Desa Lubuk Kembang Bunga beberapa tahun belakangan kinerjanya masih belum baik, masih terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun pada tahun 2019 Desa Lubuk Kembang Bunga telah lebih baik, karena laporan pertanggungjawaban diselesaikan dengan tepat waktu.”¹⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa beberapa tahun belakangan Desa Lubuk Kembang Bunga dinilai masih sebagai desa yang kurang berkembang, Hal ini disebabkan beberapa faktor dalam hal masih terlambatnya dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun pada tahun 2019 Desa Lubuk

¹⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga Pada Tanggal 20 November 2020.

¹⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tanggal 20 November 2020.

Kembang Bunga telah lebih baik, karena laporan pertanggungjawaban diselesaikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Lubuk Kembang Bunga dapat dikatakan sebagai desa berkembang dinilai dari aspek kinerjanya. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

c. Desa dan Kelurahan Berbasis Teknologi Informasi E-Government

Dibawah ini akan dilanjutkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga mengenai : Apakah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Ukui Satu telah berbasis teknologi informasi E-Government ?

“Desa Lubuk Kembang Bunga belum memiliki fasilitas teknologi informasi E-Government, sehingga pelayanan pengurusan terhadap masyarakat yang datang masih dilayani secara manual.”¹⁴⁹

Hal yang senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), ketika diwawancarai pada tanggal 20 November 2020, beliau menjelaskan :

“Memang salah satu penilaian terhadap perkembangan desa/kelurahan berorientasi pada fasilitas yang dimilikinya, seperti pemanfaatan teknologi informasi E-Government yang saat ini telah banyak di aplikasikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang telah berkembang cepat.”¹⁵⁰

¹⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga Pada Tanggal 20 November 2020.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tanggal 17 November 2020.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa belum tersedianya teknologi informasi E-Government di Desa Lubuk Kembang Bunga, hal itu dijelaskan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (PMD) yang diwawancarai pada tanggal 20 November 2020. Keterangan tambahan didapatkan bahwa untuk menilai dan menetapkan perkembangan suatu desa/kelurahan memang dilihat dari fasilitas yang telah ada di desa/kelurahan tersebut. penggunaan E-Government memang merupakan suatu kemajuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, karena akan sangat efektif dan dan mempermudah bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Lubuk Kembang Bunga dapat dikatakan sebagai desa kurang berkembang dinilai dari aspek pemanfaatan teknologi informasi E-Government yang belum tersedia. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

2. Evaluasi Bidang Kewilayahan

e. Identitas

Evaluasi bidang kewilayahan merupakan indikator penilaian perkembangan desa dan kelurahan, didalam indikator ini terdapat 4 (empat) aspek penilaian meliputi identitas, batas, inovasi dan tanggap dan siaga bencana. Jadi dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD yang ditemui pada

tanggal 20 November 2020. Pertanyaan pertama diajukan dari aspek penilaian identitas, yang kemudian peneliti interpretasikan kedalam pertanyaan dibawah ini.

Apakah Kelurahan Ukui telah menyusun data profil nya ?

“Desa Lubuk Kembang Bunga masih belum menyusun data profil Desanya, hal ini terkendala dari belum lengkapnya data dari seluruh aspek yang ada di Desa Lubuk Kembang Bunga, insha'allah tahun depan akan diupayakan untuk profil Desa Lubuk Kembang Bunga agar dapat dipublis.”¹⁵¹

Lebih lanjut keterangan dari Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga akan dihubungkan dengan pendapat Kepala Dinas Perberdayaan masyarakat desa (PMD) yang diwawancarai pada tanggal yang sama, berikut pendapatnya :

“Desa Lubuk Kembang Bunga memang belum mempublis data profil Desanya, sebab data yang dikumpulkan belum lengkap, kendalanya lainnya ada pada orang yang mengumpulksn data yang belum ada, sehingga data dari seluru aspek yang ada di desa belum dapat terdata seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, fasilitas, potensi, dan lain sebagainya.”¹⁵²

Hasil wawancara diatas memberikan informasi bahwa Desa Lubuk Kembang Bunga belum menyiapkan profil desanya, sehinga penilaian mengenai aspek identitas ini dinilai belum baik, karena belum dilaksanakan, belum dituntaskan. profil desa sendiri merupakan suatu identitas bagi sebuah institusi pemerintahan, dimana didalamnya termuat berbagai macam informasi meliputi luas wilayah, keadaan wilayah, batas wilayah, keadaan ekonomi, keadaan masyarakat dan lain sebagainya. Hal yang paling penting dengan adanya profil ini adalah bagaimana sebuah informasi dikemas secara utuh untuk kemudian dapat di tampilkan/diakses oleh publik, dan dari sini lah potensi desa dapat digali untuk di kembangkan secara lebih lanjut.

¹⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga Pada Tanggal 20 November 2020.

¹⁵² Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa pada Tanggal 20 November 2020.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Lubuk Kembang Bunga dapat dikatakan sebagai desa kurang berkembang dinilai dari aspek identitas yang belum tersedia seperti profil desanya. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

f. Batas

Lanjut pada pertanyaan selanjutnya mengenai aspek batas, sehingga pertanyaan yang menjadi instrumen dalam wawancara ini adalah : Bagaimanakah keadaan dan batas wilayah Desa Lubuk Kembang Bunga saat ini ?

“Desa Lubuk Kembang Bunga memiliki luas wilayah 257,04 Km², wilayahnya berbatasan dengan Kelurahan Ukui Satu, Desa Kampung Baru, Desa Bukit Mas dan Taman Nasional Teso Nili (TNTN).”¹⁵³

Lebih lanjut hasil wawancara diatas akan dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada tanggal 20 November 2020, informasi yang didapat terkait batas-batas wilayah Kelurahan Ukui Satu, berikut hasil wawancaranya :

“Wilayah Desa Lubuk Kembang Bunga sebagian besar merupakan wilayah Taman Nasional Teso Nilo, lebih dari separuhnya adalah kawasan taman nasional, batas wilayahnya sebelah timur Kelurahan Ukui Satu, sebelah barat Desa Kampung Baru, sebelah Utara Desa Bukit Maas. Saat ini di Desa Lubuk Kembang Bunga masih sering terjadi konflik lahan perkebunan antar masyarakat dan perusahaan ataupun antara sesama masyarakat”¹⁵⁴

¹⁵³ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga Pada Tanggal 20 November 2020.

¹⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tanggal 20 November 2020.

Hasil wawancara diatas mengenai batas wilayah Lubuk Kembang Bunga menjadi informasi yang peneliti dapatkan, informasi mengenai batas wilayah menjadi salah satu aspek penilaian evaluasi bidang kewilayahan. Batas wilayah suatu desa/kelurahan menjadi sangat penting, karena dalam menentukan besaran APBDes atau anggaran sebuah kelurahan, salah satu yang mempengaruhinya adalah mengenai batas wilayah, yang artinya luasnya, bentuk geografinya, apakah merupakan daerah yang rawan terjadi bencana banjir atau lainnya. Jadi aspek tersebut sangat penting dan mempengaruhi besaran dana yang akan dialokasikan untuk APBDes suatu desa, begitu juga dengan kelurahan.

Wilayah Lubuk Kembang Bunga masih sering terjadi konflik lahan perkebunan antara masyarakat dan perusahaan dan juga antara masyarakat itu sendiri, dimana lahan yang digarap masyarakat di klam oleh perusahaan sebagai areal perkebunan perusahaan, begitu juga antara sesama masyarakat membeli dan mengerjakan lahan sengketa.

g. Inovasi

Upaya terus dilakukan untuk mendapatkan seluruh informasi terkait aspek inovasi yang menjadi bagian penilaian indikator evaluasi bidang kewilayahan, dengan mengajukan pertanyaan berikutnya. Apakah ada inovasi yang dilakukan pemerintahan Desa Lubuk Kembang Bunga terkait kewilayahnya ?

“Desa Lubuk Kembang Bunga merupakan wilayah yang terdapat sumur-sumur minyak, sehingga hal tersebut menjadi potensi terbesar yang dimiliki oleh Desa, saat ini Desa Lubuk Kembang Bunga mendapatkan dana bagi hasil oleh PT. Pertamina lirik dari sumber minyak yang dikelolahnya.”¹⁵⁵

¹⁵⁵ Loc. Cit. Lurah Ukui Satu Pada Tanggal 17 November 2020.

Senada dengan penjelasan diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan tanggapannya terkait pertanyaan yang diajukan mengenai : Apakah ada inovasi yang dilakukan pemerintahan Kelurahan Ukui Satu terkait kewilayahnya ?

“Belum ada inovasi yang dikembangkan di Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, walaupun semestinya inovasi tersebut sangat dibutuhkan untuk peningkatan perkembangan desa/kelurahan.”¹⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara mengenai aspek inovasi, dapat diketahui bahwa Desa Lubuk Kembang Bunga Satu hingga saat ini belum memiliki inovasi dalam mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya. Inovasi itu sendiri merupakan proses, pengembangan, pemanfaatan untuk menciptakan, memperbaiki suatu untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal kewilayahan inovasi bisa dilihat dari bagaimana suatu wilayah dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya, misalnya suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata, pasar, dan lain sebagainya sesuai dengan potensi suatu wilayahnya.

Apalagi dengan potensi minyak bumi yang saat ini telah memberikan pemasukan yang besar terhadap APBDes Desa, seharusnya dengan dana yang cukup besar tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan suatu potensi di Desa Lubuk Kembang Bunga demi kesejahteraan dan kemajuan daerahnya. Sehingga dengan demikian hasil penelitian mengenai aspek inovasi ini belum baik karena memang belum adanya sebuah inovasi yang dimunculkan di kelurahan ukui satu.

¹⁵⁶ Loc. Cit. Sekretaris Camat Ukui Pada Tanggal 17 November 2020.

h. Tanggap dan Siaga Bencana

Peneliti terus berupaya untuk mengumpulkan informasi yang diharapkan dapat di berikan oleh informan, untuk itu pertanyaan terkait aspek penilaian tanggap dan siaga bencana, yang diajukan kepada Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga ketika diwawancarai pada tanggal 20 November 2020, pertanyaan tersebut meliputi : Bagaimanakah tanggap dan kesiagaan pemerintahan Desa Lubuk Kembang Bunga dalam menghadapi potensi bencana di wilayahnya ?

“Potensi terbesar bencana di wilayah Desa Lubuk Kembang Bunga adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, hampir setiap tahun terjadi di sini. Dalah hal penangannya Kepala Desa bersama stakholder terkait selalu berkoordinasi dan terjun langsung kelapangan bilamana mendapati informasi adanya titik api diwilayah titik api tersebut. Hal lainnya biasanya dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat luas akan bahayanya membuka hutan dan lahan dengan cara membakar.”¹⁵⁷

Lebih lanjut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menanggapi terkait pertanyaan yang sama ketika diwawancarai :

“Desa Lubuk Kembang Bunga sebagian besar wilayahnya adalah areal perkebunan dan kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN). Potensi terbesar bencana di wilayah Desa Lubuk Kembang Bunga adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, hampir setiap tahun terjadi di sini. Dalah hal penangannya Kepala Desa bersama stakholder terkait selalu berkoordinasi dan terjun langsung kelapangan bilamana terdapat pantauan hot spot. Upaya lainnya dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat luas akan bahayanya membuka hutan dan lahan dengan cara membakar bahkan ada sanksi hukumnya.”¹⁵⁸

Hasil wawancara diatas memberikan informasi bahwa Desa Lubuk Kembang Bunga sebagian besar wilayahnya adalah areal perkebunan dan kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN). Potensi terbesar bencana di wilayah Desa Lubuk Kembang Bunga adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, hampir setiap

¹⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga Pada Tanggal 17 November 2020.

¹⁵⁸ Loc. Cit. sekretaris Camat Ukui

tahun terjadi di sini. Dalam hal penanganannya Kepala Desa bersama stakeholder terkait selalu berkoordinasi dan terjun langsung kelapangan bilamana terdapat titik api. Upaya lainnya dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat luas akan bahayanya membuka hutan dan lahan dengan cara membakar bahkan ada sanksi hukumnya

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Lubuk Kembang Bunga dapat dikatakan sebagai desa berkembang dinilai dari aspek siaga dan tanggap bencana yang telah baik dalam penanganan di wilayah desanya. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

3. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan

i. Partisipasi

Evaluasi bidang kemasyarakatan merupakan indikator penilaian perkembangan desa dan kelurahan yang telah diatur didalam Peremdagri No. 81 tahun 2015 Tentang Evakuasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, didalam indikator ini terdapat 4 (empat) aspek penilaian meliputi partisipasi masyarakat, keamanan dan ketertibab, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga dan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa yang ditemui pada tanggal 20

November 2020. Pertanyaan pertama diajukan dari aspek penilaian identitas, yang kemudian peneliti interprtasikan kedalam pertanyaan dibawah ini.

Bagaimanakah partisipasi masyarakat di Kelurahan Ukui Satu ?

“Desa Lubuk Kembang Bunga masyarakatnya sedikit kurang peduli untuk ikut serta melibatkan diri pada kegiatan yang diadakan, namun bukan berarti mereka apatis, maksudnya warga disini yang hanya ikut berpartisipasi hanya warga yang memiliki jabatan saja, sementara warga yang tidak memiliki jabatan hanya menjadi penonton.”¹⁵⁹

Informasi yang didapatkan dari Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga akan dibandingkan dengan jawaban dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu :

“Partisipasi masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga sedikit kurang baik dibandingkan dengan masyarakat yang berada di desa trans, kemungkinan hal ini disebabkan budaya yang telah terbangun selama ini, dimana kelurahan ukui satu merupakan wilayah yang dihumi oleh orang tempatan, suku asli melayu riau. Meskipun begitu rasa persaudaraan antara mereka begitu kuat, hanya saja dalam partisipasi hanya orang yang memiliki jabatan saja yang selalu ikut dalam kegiatan yang diadakan kelurahan.”¹⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk aspek partisipasi di Desa Lubuk Kembang Bunga masyarakat nya kurang memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam kegiatan yang diadakan kelurahan, kegiatan kegotongroyongan juga tidak begitu baik. Masyarakat Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga merupakan masyarakat tempatan yang dihuni mayoritas suku melayu dan jawa. Sehingga berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi, Kelurahan Ukui Satu dinilai masih kurang berkembang, sehingga harus lebih ditingkatkan lagi dengan membangun kesadaran antar warga.

¹⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Lurah Ukui Satu pada tanggal 17 November 2020.

¹⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Camat Ukui pada tanggal 17 November 2020.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Lubuk Kembang Bunga dapat dikatakan sebagai desa “kurang berkembang” dinilai dari aspek partisipasi masyarakat yang kurang sadar untuk berpartisipasi. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

j. Keamanan dan Ketertiban

Wawancara dilanjutkan untuk mengumpulkan informasi terkait aspek penilaian yang ada didalam evaluasi bidang kemasyarakatan. Pertanyaan kali ini terkait aspek keamanan dan ketertiban, pertanyaan yang diajukan yaitu :

Bagaimanakah menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Lubuk Kembang Bunga ?

“Keamanan di Desa Lubuk Kembang Bunga diciptakan dengan melakukan upaya koordinasi dan komunikasi antar stakholder, saya sebagai lurah biasanya menyampaikan langsung kepada ketua RT/RW Desa Lubuk Kembang Bunga satu untuk selalu menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing menyampaikan ke jajaran RT/RW danarganya untuk waspada terhadap tindak kriminalitas.”¹⁶¹

Lebih jauh informasi selanjutnya didapatkan dari Kepala Dinas, ketika diwawancarai beliau menjelaskan terkait keamanan dan ketertiban yang ada di Desa Lubuk Kembang Bunga bahwa :

“Menciptakan keamanan merupakan tanggungjawab bersama, untuk itu para stakeholder mulai dari Unsur pemerintahan desa, camat, bhabinkamtibmas, bhabinsa selalu berkoordinasi apabila ada gejala atau potensi yang dapat menimbulkan konflik terutama antar warga desa. Dalam

¹⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga Pada Tanggal 20 November 2020.

konteks lain seperti pencegahan dan meminimalisir kriminalitas di desa kecamatan ukui dilakukan upaya pengaktifan kembali poskamling, karena untuk bangunan poskamling itu sendiri di masing-masing desa memang telah tersedia.”¹⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa setiap desa dan kelurahan telah memiliki koordinasi yang baik antar stakholder. Hal ini didukung dengan prasarana yang seperti pos penjagaan/pos ronda yang telah dimiliki disetiap sudut desa dan juga kordinasi serta komunikasi antara sesama warga desa dan juga jajaran stakholder yang ada di wilayah tersebut sehingga keamanan dan rasa aman tentu dapat dirasakan warga desa. Hal ini juga tidak terlepas dari peran aktifnya babinkhabtimas dan babinsa bersama dengan warga desa membangun komunikasi yang baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait aspek keamanan dan ketertiban telah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Lubuk Kembang Bunga dapat dikatakan sebagai desa ‘berkembang’ dinilai dari aspek “menjaga keamanan dan ketertiban” yang telah baik di wilayah desanya. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

¹⁶² Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Pada tanggal 20 November 2020.

k. Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu penilaian didalam evaluasi bidang kemasyarakatan untuk melihat tingkat perkembangan desa dan kelurahan, untuk itu dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga pada tanggal 20 November 2020, pertanyaan yang diajukan adalah : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas pendidikan di Desa Lubuk Kembang Bunga ?

“Desa Lubuk Kembang Bunga hanya memiliki 1 (satu) Taman Kanak-Kanak (TK), 1 (satu) dan Sekolah Dasar. Akses menuju fasilitas pendidikan tersebut merupakan jalan kerikil dengan tanah yang keras.”¹⁶³

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa pada tanggal 20 November menjelaskan bahwa :

“Akses menuju ke fasilitas pendidikan baik tingkat SD jalannya kerikil dan tanah keras. Jarak tempuh terdekat sampai dengan terjauh antara 0-30 Km.”¹⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait pertanyaan aspek pendidikan, diketahui bahwa Desa Lubuk Kembang Bunga memiliki 1 (satu) Taman Kanak-Kanak (TK), 1 (satu) Sekolah Dasar Untuk akses jalannya sendiri masih jalan tanah padat yang berkerikil. Fasilitas Sekolah yang belum memadai dan ditambah jarak menuju ke sekolah dasar ada yang sampai 30 Km, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Desa Lubuk Kembang Bungan adalah kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN).

¹⁶³ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga pada tanggal 20 November 2020.

¹⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tanggal 20 November 2020.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Lubuk Kembang Bunga dapat dikatakan sebagai desa “kurang berkembang” dinilai dari aspek “pendidikan” yang ada di wilayah desanya. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

I. Kesehatan

Wawancara dilanjutkan untuk mengumpulkan informasi terkait aspek penilaian yang ada didalam evaluasi bidang kemasyarakatan. Pertanyaan kali ini terkait aspek kesehatan, pertanyaan yang diajukan yaitu : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas kesehatan di Desa Lubuk Kembang Bunga ?

“Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga pada tanggal 20 November 2020.

“Desa Lubuk Kembang Bunga memiliki 1 (satu) Poliklinik, 1 (satu) Polindes, keberadaannya tersebar di beberapa tempat di tengah Desa Lubuk Kembang Bunga, jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah penduduk tidak lebih dari 10 Km, namun keberadaan fasilitas kesehatan tersebut tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga desa Lubuk Kembang Bunga, hal ini dikarenakan mayoritas warga yang lebih percaya dan memilih menggunakan jasa pengobatan kampung.”¹⁶⁵

Lebih lanjut tambahan informasi terkait aspek kesehatan yang merupakan penilaian terakhir dari evaluasi bidang kemasyarakatan, untuk itu akan diwawancarai Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa pada tanggal 20 November 2020, beliau menjelaskan bahwa :

¹⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga Pada Tanggal 20 November 2020.

“Keberadaan fasilitas kesehatan seperti poskesdes, polindes dan posyandu tidak semua fasilitas tersebut tersedia di desa, hanya beberapa desa saja yang memiliki ke tiga fasilitas tersebut, hanya posyandu yang telah dimiliki di masing-masing desa. Poskesdes, Polindes dan posyandu pada umumnya berada tidak jauh dari ibukota desa, sehingga untuk jaraknya sendiri bervariasi, namun untuk sebagian warga jarak fasilitas kesehatan tersebut cukup dekat berkisar 0-10 Km. Desa yang berada di Kecamatan Ukui sendiri sebagaimana besar telah tersedia fasilitas kesehatan seperti praktek bidan yang membuka izin praktek, untuk praktek dokter hanya berada di ibukota Kecamatan Ukui.”¹⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa. Desa Lubuk Kembang Bunga memiliki 1 (satu) Poliklinik, 1 (satu) Polindes, namun ada kebiasaan yang terbawa hingga saat ini, yang mana mayoritas warga desa Lubuk Kembang Bunga lebih percaya dan memilih pengobatan kampung, sehingga yang terjadi fasilitas kesehatan yang ada tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari aspek kesehatan, desa Lubuk Kembang Bunga telah baik karena memiliki fasilitas kesehatan di desanya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut, maka Desa Lubuk Kembang Bunga dapat dikatakan sebagai desa “kurang berkembang” dinilai dari aspek kesehatan yang mana masyarakatnya masih kuat dalam mempercayai pengobatan kampung, sehingga fasilitas kesehatan yang tersedia menjadi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga. Namun perlu dikaji lebih lanjut terhadap seluruh aspek lain yang menjadi bagian dari indikator evaluasi bidang pemerintahan, untuk itu peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi kepada informan dengan mengajukan pertanyaan lainnya.

¹⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tanggal 20 November 2020.

Tabel IV. 13 : Rekapitulasi Evaluasi Perkembangan Desa di Kecamatan Ukui

| No | Desa/ Kelurahan | Fakta | | | Indikator | Keterangan |
|----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | Kelurahan Ukui Satu | Kurang berkembang | Kurang berkembang | Berkembang | 1. Evaluasi bidang pemerintahan. 2. Evaluasi bidang kewilayah an. 3. Evaluasi bidang kemasyar akatan | |
| 2 | Desa Ukui Dua | Kurang berkembang | Kurang berkembang | Kurang berkembang | 1. Evaluasi bidang pemerintahan. 2. Evaluasi bidang kewilayah an. 3. Evaluasi bidang kemasyar akatan | |
| 3 | Desa Lubuk Kembang Bunga | Kurang berkembang | Kurang berkembang | Kurang berkembang | 1. Evaluasi bidang pemerintahan 2. Evaluasi bidang kewilayah an. 3. Evaluasi | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| | | | | | bidang kemasyar akatan | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|

Sumber :Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui terdapat 7 (tujuh) desa telah berstatus sebagai desa mandiri dan 4 (empat) desa berstatus sebagai desa maju dan 1 (satu) kelurahan berstatus sebagai kelurahan maju. lainnya masih berstatus desa sebagai maju. Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah Kelurahan Ukui Satu, Desa Ukui Dua dan Desa Air Hitam.

C.4. Bagaimanakah Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Permendagri No. 81 tahun 2015 Tentang evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dari kurun waktu dari bulan januari sampai dengan bulan desember. Evaluasi Bidang Pemerintahan, Evaluasi Bidang Kewilayahan dan Evaluasi Bidang Kemasyarakatan merupakan instrumen dasar dalam melihat tingkat perkembangan desa dan kelurahan apak desa/kelurahan itu cepat berkembang, berkembang atau kurang berkembang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dibawah ini akan diuraikan hasil penelitian evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di Kelurahan Ukui Satu, Desa Ukui Dua dan Desa Lubuk Kembang Bunga :

1. Kelurahan Ukui Satu dinilai sebagai kelurahan yang potensial untuk berkembang, hal ini berdasarkan hasil penelitian evaluasi bidang

pemerintahan yang mencakup aspek pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, dibawah ini akan diuraikan hal-hal yang menjadi perhatian dalam evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di Kecamatan Ukui.

a. Evaluasi bidang pemerintahan

- Kelurahan Ukui Satu penyelenggaraan pemerintahannya berjalan dengan baik, masyarakat dilayani sesuai dengan aturan dan standar operasional (SOP).
- Pada aspek kreatifitas pemberdayaan masyarakat, Desa Ukui Dua belum mampu menguatkan masyarakatnya dengan memberikam program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dan UMKM, sehingga hal ini harus mendapatkan perhatian serius agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- Kelurahan Ukui Satu belum menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi E-Governmant, tujuan pemanfaatan E-Governmant ini dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Dengan telah diaplikasikannya teknologi informasi seperti ini. itu menandakan slah satu Kelurahan yang cepat berkembang.

b. Evaluasi Bidang Kewilayahan

- Kelurahan Ukui Satu belum memiliki profil kelurahan, sehingga hal ini akan menghambat/mengurangi Kelurahan Ukui Satu menjadi

berkembang. Untuk itu diharapkan adanya penyusunan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan untuk menyediakan data dan informasi primer yang relevan, valid serta komprehensif agar dapat menjadi rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

- Pada aspek inovasi, Kelurahan Ukui Satu dapat dikategorikan kurang berkembang, karena belum memiliki inovasi yang dapat dikembangkan di wilayahnya selain pasar dan warung makan.

c. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan.

- Pada aspek partisipasi, Kelurahan Ukui Satu dapat dikategorikan kurang berkembang, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi tidak begitu baik, sehingga hal itu harus diperbaiki.
- Pada aspek pendidikan, Kelurahan Ukui Satu dapat dikategorikan telah berkembang, karena telah terdapat 4 (empat) fasilitas pendidikan, terdiri dari 1 (satu) TK dan 2 Sekolah Dasar (SD), dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Akses menuju fasilitas pendidikan tersebut dua diantaranya telah jalannya telah diaspal sebagian, sedangkan selebihnya masih berupa tanah keras dan batu kerikil, sehingga hal ini harus diperbaiki.
- Pada aspek kesehatan, Kelurahan Ukui Satu telah terdapat fasilitas yang memadai, namun mayoritas masyarakatnya lebih banyak menggunakan jasa pengobatan kampung.

2. Desa Ukui Dua dinilai sebagai Desa yang potensial untuk cepat berkembang, hal ini berdasarkan hasil penelitian evaluasi bidang pemerintahan yang mencakup aspek pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, dibawah ini akan diuraikan hal-hal yang menjadi perhatian dalam evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di Kecamatan Ukui.

a. Evaluasi Bidang Pemerintahan

- Pada aspek pemerintahan, Desa Ukui Dua dalam penyelenggaraan pemerintahannya berjalan dengan baik, masyarakat dilayani sesuai dengan aturan dan standar operasional (SOP).
- Pada aspek kinerja, Desa Ukui Dua telah memperbaiki penyelesaian laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan tepat waktu.
- Pada aspek kreatifitas pemberdayaan masyarakat, Desa Ukui Dua belum mampu menguatkan masyarakatnya dengan memberikam program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, UMKM, dan BUMDes, sehingga hal ini harus mendapatkan perhatian serius agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- Pada aspek pemanfaatan tegnologi informasi E-Governmant, Desa Ukui Dua belum menerapkan dan memanfaatkan tegnologi informasi E-Governmant, tujuan pemanfaatan E-Governmant ini dapat

meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

b. Eevaluasi Bidang Kewilayahan

- Pada aspek identitas, Desa Ukui Dua belum memiliki profil desa, sehingga hal ini akan menghambat/mengurangi Desa Ukui Dua menjadi berkembang. Untuk itu diharapkan adanya penyusunan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan untuk menyediakan data dan informasi primer yang relevan, valid serta komprehensif agar dapat menjadi rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- Pada aspek inovasi, Desa Ukui Dua memiliki potensi minyak bumi yang saat ini dikelola PT Pertamina Lirik. Desa Ukui Dua mendapatkan bagi hasil dari potensi tersebut, sehingga APBDesa Ukui Dua setiap tahunnya mencapai 2 milyar lebih. Dengan APBDes yang cukup besar, hingga saat ini Desa Ukui Dua belum mampu berinovasi untuk membuat terobosan yang dapat mensejahterakan dan memajukan Desanya.

c. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan

- Pada aspek pendidikan, Desa Ukui Dua bisa dikategorikan telah berkembang karena fasilitas pendidikan yang cukup memadai, terdapat 2 taman kanak-kanak (TK), 1 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- Pada aspek kesehatan, Desa Ukui Dua bisa dikategorikan telah berkembang, karena telah memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai. Terdapat 1 Polindes, 1 Poliklinik, dan 2 Posyandu. Namun mayoritas warga Desa Ukui Dua lebih banyak menggunakan jasa pengobatan kampung dibandingkan menggunakan fasilitas perobatan yang ada di desa.
3. Desa Lubuk Kembang Bunga dinilai sebagai Desa yang potensial untuk berkembang, hal ini berdasarkan hasil penelitian evaluasi bidang pemerintahan yang mencakup aspek pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, dibawah ini akan diuraikan hal-hal yang menjadi perhatian dalam evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di Kecamatan Ukui.
- a. Evaluasi Bidang Pemerintahan
- Pada aspek pemerintahan, Desa Lubuk Kembang Bunga dalam penyelenggaraan pemerintahannya berjalan dengan baik, masyarakat dilayani sesuai dengan aturan dan standar operasional (SOP).
 - Pada aspek kinerja, Desa Lubuk Kembang Bunga telah memperbaiki penyelesaian laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan tepat waktu.
 - Pada aspek kreatifitas pemberdayaan masyarakat, Desa Lubuk Kembang Bunga belum mampu menguatkan masyarakatnya dengan memberikam program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, UMKM, dan BUMDes, sehingga hal ini harus mendapatkan

perhatian serius agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

- Pada aspek pemanfaatan teknologi informasi E-Government, Desa Lubuk Kembang Bunga belum menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi E-Government, tujuan pemanfaatan E-Government ini dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

b. Eavaluasi Bidang Kewilayahan

- Pada aspek identitas, Desa Lubuk Kembang Bunga belum memiliki profil desa, sehingga hal ini akan menghambat/mengurangi Desa Lubuk Kembang Bunga menjadi berkembang. Untuk itu diharapkan adanya penyusunan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan untuk menyediakan data dan informasi primer yang relevan, valid serta komprehensif agar dapat menjadi rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- Pada aspek inovasi, Desa Lubuk Kembang Bunga berpotensi menjadi desa berkembang, karena wilayahnya yang menjadi perlintasan utama menuju Taman Nasional Teso Nilo (TNTN), sehingga wilayah Desa Kembang Bunga dapat mengembangkan potensi diwilayahnya.

c. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan

- Pada aspek pendidikan, Desa Ukui Dua bisa dikategorikan kurang berkembang karena fasilitas pendidikan yang belum memadai, terdapat 1 taman kanak-kanak (TK), 1 Sekolah Dasar (SD). Hal ini diperparah dengan adanya 2 dusun yang dihuni sekitar 40% penduduk Desa Lubuk Kembang Bunga yang terletak sangat jauh dari fasilitas pendidikan yang berada di ibukota desa, jika ingin menuju kesana jarak yang ditempuh mencapai 20 Km, tentu hal ini sangat memprihatinkan dan harus segera dicarikan solusinya..
- Pada aspek kesehatan, Desa Lubuk Kembang Bunga bisa dikategorikan kurang berkembang, karena belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. hanya terdapat 1 Polindes dan psoyandu. Hal ini diperparah dengan adanya 2 dusun yang mana dihuni sekitar 40% penduduk Desa Lubuk Kembang Bunga yang terletak sangat jauh dari fasilitas pendidikan tersebut, jika ingin menuju ke ibukota desa jarak yang ditempuh mencapai 20 Km, tentu hal ini sangat memprihatinkan dan harus segera dicarikan solusinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian kepada Kelurahan Ukui Satu, Desa Ukui Dua dan Desa Lubuk Kembang Bunga, dibawah ini akan dijelaskan beberapa indikator yang mana :

1. Kelurahan Ukui Satu dapat dikategorikan berkembang. Hal ini berdasarkan penilaian pada setiap indikator evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan, dimana Kelurahan Ukui Satu telah memenuhi syarat sebagai kelurahan yang berkembang, walaupun begitu kelurahan ukui satu harus mempertahankan dan meningkatkan perkembangan desanya.
2. dikarenakan ini karena kelurahan ukui satu terletak tidak jauh dari pusat ibukota Kecamatan, dimana disana terdapat pertokoan dan pasar yang menghidupkan aktifitas ekonomi, karena ciri-ciri daerah yang berkembang adalah terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi yang menjadi penghasilan masyarakatnya selain dari sektor perkebunan. Pada aspek pendidikan Kelurahan Ukui Satu telah memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai, begitu juga dengan fasilitas kesehatan. Namun untuk mempertahankan sebagai Kelurahan berkembang, Kelurahan Ukui harus memiliki profil sebagai identitas kelurahannya, dan juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut andil berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada, hal ini sangat penting untuk disadari, karena salah satu ciri

kelurahan berkembang masyarakatnya kompak memiliki solidaritas dan toleransi antar sesame.

3. Desa Ukui Dua dinilai sebagai desa yang berpotensi untuk berkembang, hal ini dikarenakan desa ukui dua berada tidak berada jauh dari ibukota kecamatan ukui, jadi dari sisi aktifitas ekonomi dapat dimanfaatkan warganya untuk berdagang. Selain itu desa ukui dua memiliki potensi yang sangat tinggi diwilayahnya, dimana terdapat wilayah yang telah dijadikan sumur minyak oleh PT Pertamina Lirik, dari sana mereka mendapatkan bagi hasil, sehingga setiap tahunnya desa ukui dua memiliki APBDes 2 milyar lebih. Tentu ini adalah modal untuk dapat dikembangkan dengan melakukan inovasi dan terobosan dalam kemajuan wilayahnya. Pada aspek pendidikan desa ukui dua telah memiliki fasilitas yang memadai, begitu pula pada aspek kesehatan.
4. Desa Lubuk Kembang Bunga dinilai sebagai desa yang kurang berkembang, hal ini dikarenakan desa lubuk kembang bunga berada sangat jauh dari ibukota kecamatan ukui. Selain desa ini memiliki wilayah terluas di kecamatan ukui, namun memiliki jumlah persebaran penduduk yang sedikit, karena wilayah teluasnya merupakan kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN), namun luasnya wilayah menjadi potensi desa lubuk kembang bunga mendapatkan porsi dana desa yang lebih besar ketimbang desa lainnya. Pada aspek pendidikan dan kesehatan desa lubuk kembang bunga belum memiliki fasilitas yang memadai, terutama jarak fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sangat jauh dari 2 dusun yang berada jauh dari ibukota desa, padahal 2 dusun ini memiliki jumlah penduduk 40% dari total populasi penduduk desa

kembang bunga, namun tidak memiliki fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lalu pada aspek tanggap dan siaga bencana. Desa Lubuk Kembang Bunga adalah desa yang rentan terhadap bencana banjir, hingga saat ini belum ada upaya serius yang dilakukan untuk mitigasi bencana banjir ini.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui dinas terkait untuk membantu Kelurahan Ukui Satu dalam meningkatkan evaluasi bidang pemerintahan terutama pada aspek pemerintahan, inisiatif dan kreatifitas pemberdayaan masyarakat. Evaluasi bidang kewilayahan pada aspek identitas dan inovasi. Evaluasi bidang kemasyarakatan terutama pada aspek partisipasi masyarakat serta keamanan dan ketertiban.
2. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui dinas terkait untuk membantu Desa Ukui Dua dalam meningkatkan evaluasi bidang pemerintahan terutama pada aspek pemerintahan, kinerja serta inisiatif dan kreatifitas pemberdayaan masyarakat. Evaluasi bidang kewilayahan terutama pada aspek identitas, inovasi dan tanggap siaga bencana. Evaluasi bidang kemasyarakatan terutama pada aspek partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta keamanan dan ketertiban.
3. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui dinas terkait untuk membantu Desa Lubuk Kembang Bunga dalam meningkatkan evaluasi bidang pemerintahan terutama pada aspek pemerintahan, kinerja serta inisiatif dan kreatifitas pemberdayaan masyarakat. Evaluasi bidang

kewilayahan terutama pada aspek identitas, inovasi dan tanggap siaga bencana. Evaluasi bidang kemasyarakatan terutama pada aspek partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan serta keamanan dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- A.S. Moenir. 2003. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta. Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Abu Ahmadi dan Cholid Narbuko, 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Awang, Azam dan Wijaya, Mendra. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Alaf Riau. Pekanbaru. 2011.
- Awang, Azam, Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau, Pekanbaru
- Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta.
- Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta.
- Meleong, J. Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B & Hubermen A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992 Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong. J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 2008. *Kybernologi Kepamongprajaan*. Sirao Credentia Center, Tangerang Banten.

Prasetyo, Sri Bambang. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Rajawali Pers : Jakarta.
Press.

Rasyid, M. Ryass, 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. PT. Yasrif Watampone, Jakarta.

Rasyid, M. Ryass, 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. PT. Yasrif Watampone, Jakarta.

Rauf Rahyunir dan Maulidiah Sri. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru. Nusa Media.

Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemimpinan yang Baik)* Jilid II. Bandung; Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986).

Sugiyono. 2009. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung Alfabeta.

Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama, Bandung

Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Mandar Maju, Bandung.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Teras.

Tjenreng. Bahadrudin. 2002. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. CV Armaco.

Winardi, J. 2004. *Motivasi & Pemasalahan Dalam Manajemen*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Media Pressindo.

Yusri Munaf, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau.

B. Jurnal :

Akhmad, Dede, *Pemekaran Wilayah Kecamatan : Perspektif Teoritis*, Jurnal Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UNSUB – Edisi 1 Tahun 2008.

Ruslan, 2013. [Http :// seputar pengertian data.com](http://seputar.pengertiandata.com), sabtu, 19 Juli 2020, 20.34 Wib.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015
Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

